



Biro Kepegawaian
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

BUKU STATISTIK

Pegawai Negeri Sipil

Kementerian Dalam Negeri

TAHUN 2024





DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
BAB I: Profil Pegawai Negeri Sipil	1
A. Pertumbuhan Pegawai Negeri Sipil	1
B. Distribusi Penyebaran Pegawai Negeri Sipil	2
BAB II: Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Agama	4
BAB III: Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin	5
A. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelompok Usia	5
B. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin	5
C. PNS Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin	6
BAB IV: Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
A. PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Umum Terakhir	8
B. PNS Berdasarkan Jabatan Struktural dan Tingkat Pendidikan Terakhir ..	10
BAB V: Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan	13
A. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan Ruang	13
B. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan	18
C. PNS Berdasarkan Jabatan Struktural dan Tingkat Pendidikan Terakhir	19
D. Bezetting Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan Golongan	23
E. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Masa Kerja Keseluruhan	25
BAB VI: Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pensiun, Meninggal, Pindah Wilayah Kerja dan Berhenti	27
A. Pegawai Pensiun	27
B. Pegawai Meninggal	28
C. Pegawai Pindah Wilayah Kerja	29
D. Pegawai Berhenti	30
E. Pegawai Pensiun Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	31
F. Pegawai Meninggal Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	33
G. Pegawai Pindah Wilayah Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	35
H. Pegawai Berhenti Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	38
BAB VII: Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukuman Disiplin	40
BAB VIII: Kesimpulan	41



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Buku Statistik (Buku dalam angka) Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 ini. Buku ini disusun sebagai bentuk laporan mengenai kondisi dan perkembangan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang mencakup berbagai aspek penting, seperti pertumbuhan jumlah pegawai, distribusi penyebaran pegawai, dan pembagian berdasarkan kategori usia, jenis kelamin, pendidikan, golongan, serta status kepegawaian.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas, buku ini juga memberikan gambaran tentang kebijakan dan langkah-langkah yang telah diambil dalam pengelolaan pegawai, termasuk data tentang masa kerja, pensiun, kenaikan pangkat serta hukuman disiplin. Dengan informasi yang terkandung dalam buku ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika dan kebutuhan pegawai di Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan profesional.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyajiannya. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam proses penyusunan buku ini, terutama kepada para pegawai yang telah bekerja keras dalam mengumpulkan dan memverifikasi data yang akurat.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan pegawai di Kementerian Dalam Negeri, serta sebagai alat ukur untuk perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar dan mendukung upaya kami dalam menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas.

Kepala Biro Kepegawaian
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia



Dian Andy Permana, M. Si



I. Profil Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

A. Pertumbuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

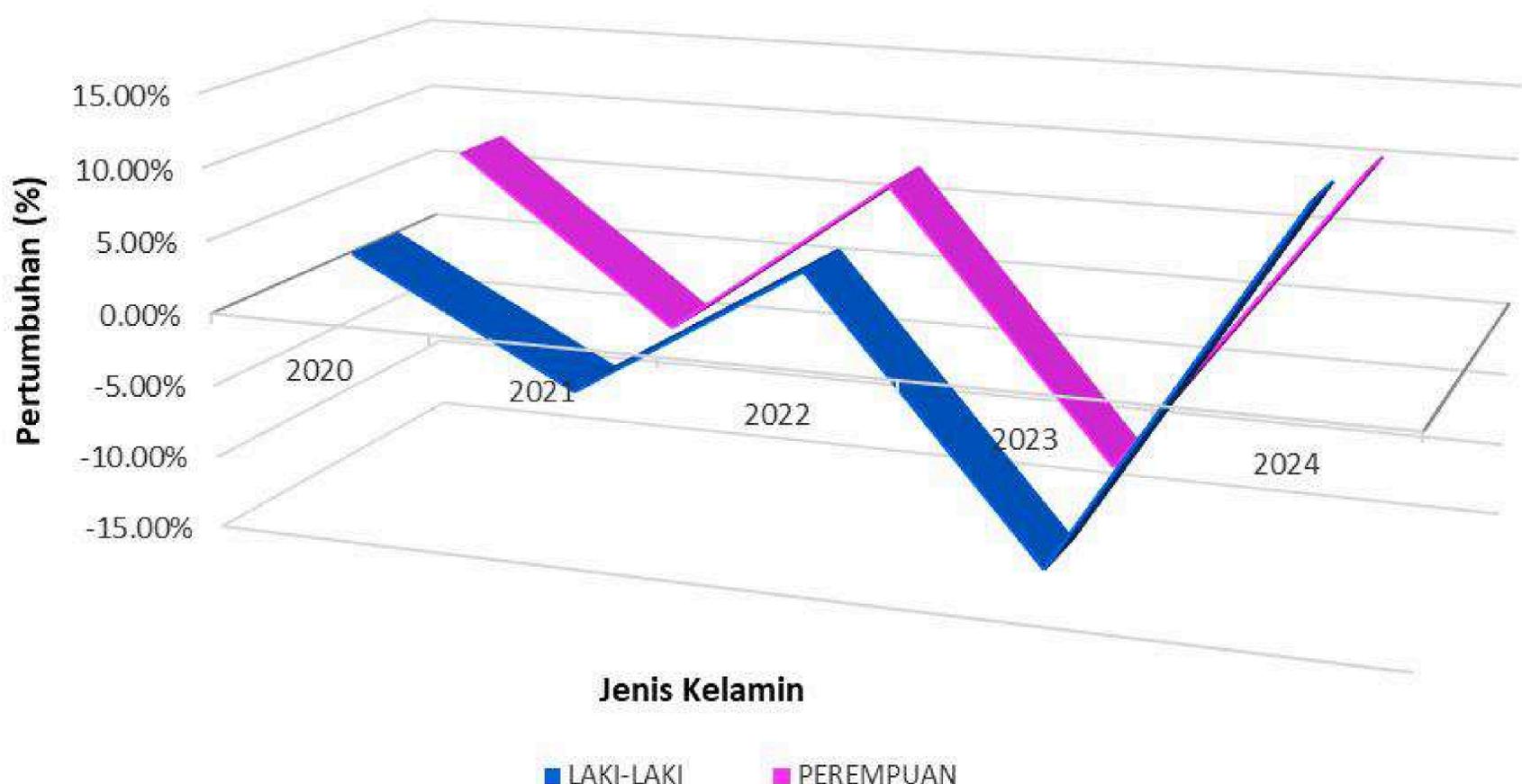
TAHUN	LAKI-LAKI	PERTUMBUHAN	PEREMPUAN	PERTUMBUHAN	JUMLAH	PERTUMBUHAN
1	2	3	4	5	6	7
2020	3074	3.71%	2130	7.51%	5204	5.27%
2021	2945	-4.38%	2048	-4.00%	4993	-4.23%
2022	3105	5.15%	2214	7.50%	5319	6.13%
2023	2748	-12.99%	1996	-10.92%	4744	-12.12%
2024	3128	12.15%	2231	10.53%	5359	11.48%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan Pegawai Negeri Sipil

Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang paling sedikit terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah pegawai sebanyak 4744 orang yang terdiri dari jumlah pegawai laki-laki sebanyak 2748

orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 1996 orang. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang paling banyak terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah pegawai sebanyak 5359 orang yang terdiri dari jumlah pegawai laki-laki sebanyak 3128 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 2231 orang. Setelah dilakukan validasi pada Bulan Oktober 2024, terlihat dalam tabel terjadi pertumbuhan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri yaitu

sebesar 11,48% dari tahun sebelumnya. Adanya pertumbuhan tersebut terjadi pada jumlah pegawai perempuan dari 1996 pegawai menjadi 2231 pegawai. Sedangkan jumlah pegawai laki-laki mengalami pertumbuhan dari 2748 pegawai menjadi 3128 pegawai. Dengan demikian, grafik pertumbuhan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

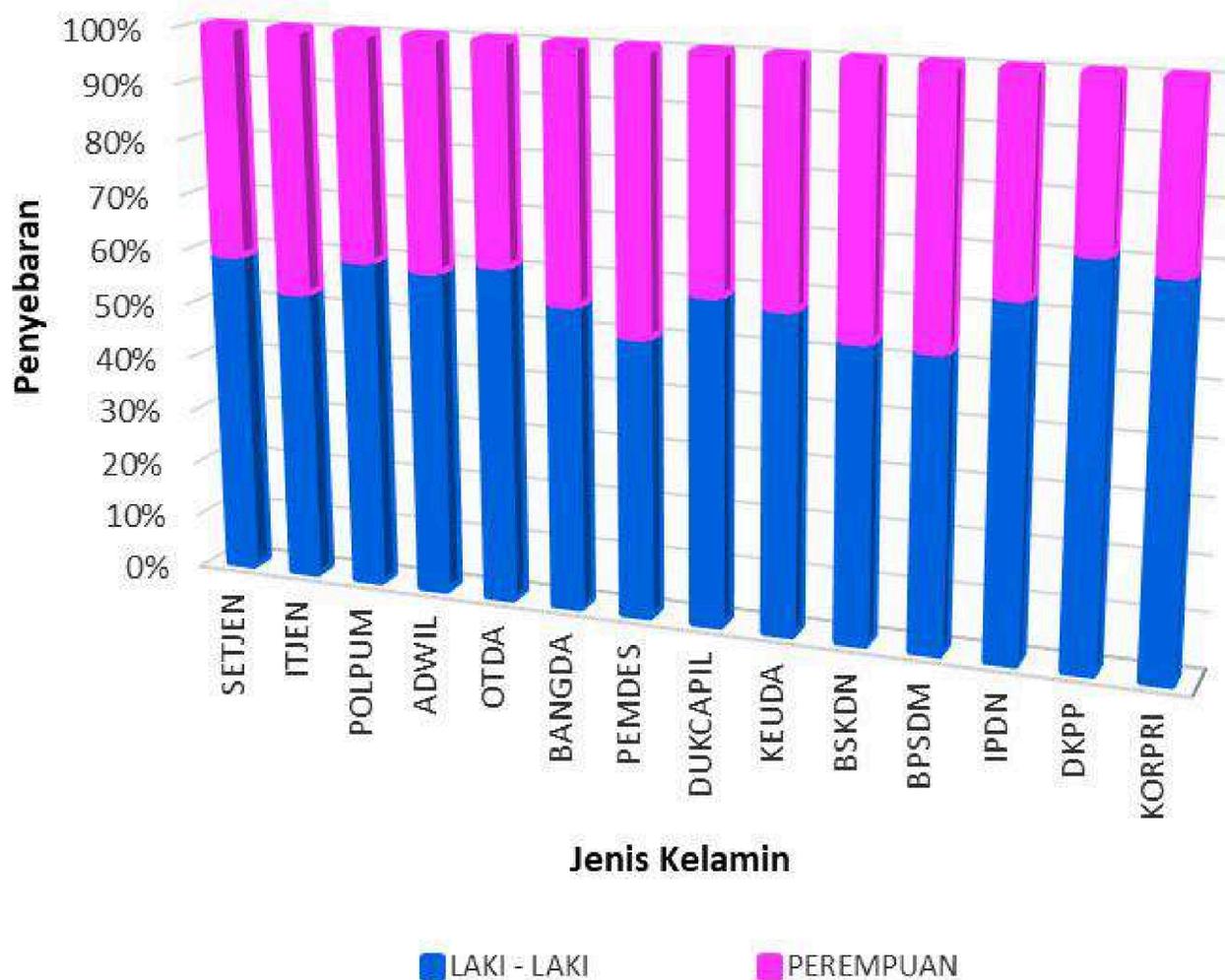




B. Distribusi Penyebaran Pegawai Negeri Sipil

NO.	UNIT KERJA	LAKI - LAKI	PENYEBARAN	PEREMPUAN	PENYEBARAN	JUMLAH	PENYEBARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKRETARIAT JENDERAL :						
	BIRO PERENCANAAN	42	1.44%	37	1.77%	79	1.58%
	BIRO KEPEGAWAIAN	63	2.17%	55	2.63%	118	2.36%
	BIRO UMUM	65	2.24%	44	2.10%	109	2.18%
	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	33	1.14%	29	1.39%	62	1.24%
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	84	2.89%	36	1.72%	120	2.40%
	BIRO HUKUM	25	0.86%	21	1.00%	46	0.92%
	PUSAT FASILITASI KERJA SAMA	27	0.93%	15	0.72%	42	0.84%
	PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI	42	1.44%	30	1.43%	72	1.44%
	BIDANG HUKUM DAN KESATUAN BANGSA	1	0.03%	0	0.00%	1	0.02%
	BIDANG KEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	1	0.03%	0	0.00%	1	0.02%
	STAF KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI	4	0.14%	0	0.00%	4	0.08%
	PUSAT PENERANGAN	25	0.86%	22	1.05%	47	0.94%
	BIRO KEUANGAN DAN ASET	46	1.58%	32	1.53%	78	1.56%
2	INSPEKTORAT JENDERAL	137	4.71%	122	5.83%	259	5.18%
3	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	156	5.37%	105	5.02%	261	5.22%
4	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	149	5.13%	104	4.97%	253	5.06%
5	DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH	159	5.47%	102	4.88%	261	5.22%
6	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH	162	5.57%	132	6.31%	294	5.88%
7	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	198	6.81%	194	9.28%	392	7.84%
8	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	145	4.99%	101	4.83%	246	4.92%
9	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	173	5.95%	127	6.07%	300	6.00%
10	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	74	2.55%	65	3.11%	139	2.78%
11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	259	8.91%	232	11.10%	491	9.82%
12	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	794	27.31%	468	22.38%	1262	25.25%
13	SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	32	1.10%	13	0.62%	45	0.90%
14	SEKRETARIAT PENGURUS KORPRI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	11	0.38%	5	0.24%	16	0.32%
	TOTAL	2907	100.00%	2091	100.00%	4998	100.00%

Untuk grafik Distribusi Penyebaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri keadaan bulan Oktober 2024 dapat terlihat sebagai berikut :





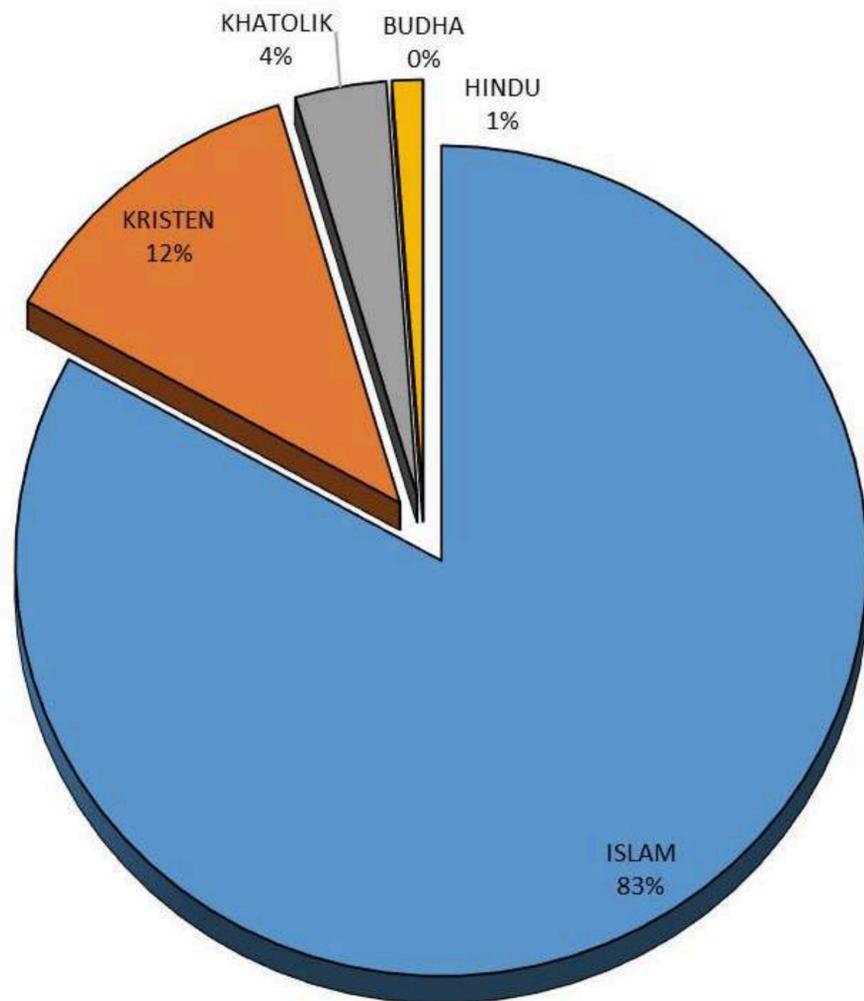
Berdasarkan Grafik Jumlah Distribusi Penyebaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

1. Pada unit kerja Sekretariat Jenderal, distribusi penyebaran laki-laki sebanyak 15.76% dengan jumlah 458 orang dan distribusi penyebaran perempuan sebanyak 15.35% dengan jumlah 321 orang.
2. Pada unit kerja Inspektorat Jenderal, distribusi penyebaran laki-laki sebanyak 4.71% dengan jumlah 137 orang dan distribusi penyebaran perempuan sebanyak 5.83% dengan jumlah 122 orang.
3. Pada unit kerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, distribusi penyebaran laki-laki sebanyak 5.37% dengan jumlah 156 orang dan distribusi penyebaran perempuan sebanyak 5.02% dengan jumlah 105 orang.
4. Pada unit kerja Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan, distribusi penyebaran laki-laki sebanyak 5.13% dengan jumlah 149 orang dan distribusi penyebaran perempuan sebanyak 4.97% dengan jumlah 104 orang.
5. Pada unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, distribusi penyebaran laki-laki sebanyak 5.47% dengan jumlah 159 orang dan distribusi penyebaran perempuan sebanyak 4.88% dengan jumlah 102 orang.
6. Pada unit kerja Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, distribusi penyebaran laki-laki sebanyak 5.57% dengan jumlah 162 orang dan distribusi penyebaran perempuan sebanyak 6.31% dengan jumlah 132 orang.
7. Pada unit kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, distribusi penyebaran laki-laki sebanyak 6.81% dengan jumlah 198 orang dan distribusi penyebaran perempuan sebanyak 9.28% dengan jumlah 194 orang.
8. Pada unit kerja Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, distribusi penyebaran laki-laki sebanyak 4.99% dengan jumlah 145 orang dan distribusi penyebaran perempuan sebanyak 4.83% dengan jumlah 101 orang.
9. Pada unit kerja Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, distribusi penyebaran laki-laki sebanyak 5.95% dengan jumlah 173 orang dan distribusi penyebaran perempuan sebanyak 6.07% dengan jumlah 127 orang.
10. Pada unit kerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, distribusi penyebaran laki-laki sebanyak 2.55% dengan jumlah 74 orang dan distribusi penyebaran perempuan sebanyak 3.11% dengan jumlah 65 orang.
11. Pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, distribusi penyebaran laki-laki sebanyak 8.91% dengan jumlah 259 orang dan distribusi penyebaran perempuan sebanyak 11.10% dengan jumlah 232 orang.
12. Pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, distribusi penyebaran laki-laki sebanyak 27.31% dengan jumlah 794 orang dan distribusi penyebaran perempuan sebanyak 22.38% dengan jumlah 468 orang.
13. Pada unit kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, distribusi penyebaran laki-laki sebanyak 1.10% dengan jumlah 32 orang dan distribusi penyebaran perempuan sebanyak 0.62% dengan jumlah 13 orang.
14. Pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI, distribusi penyebaran laki-laki sebanyak 0.38% dengan jumlah 11 orang dan distribusi penyebaran perempuan sebanyak 0.24% dengan jumlah 5 orang.

II. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Agama

Berdasarkan Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Agama adalah sebagai berikut :

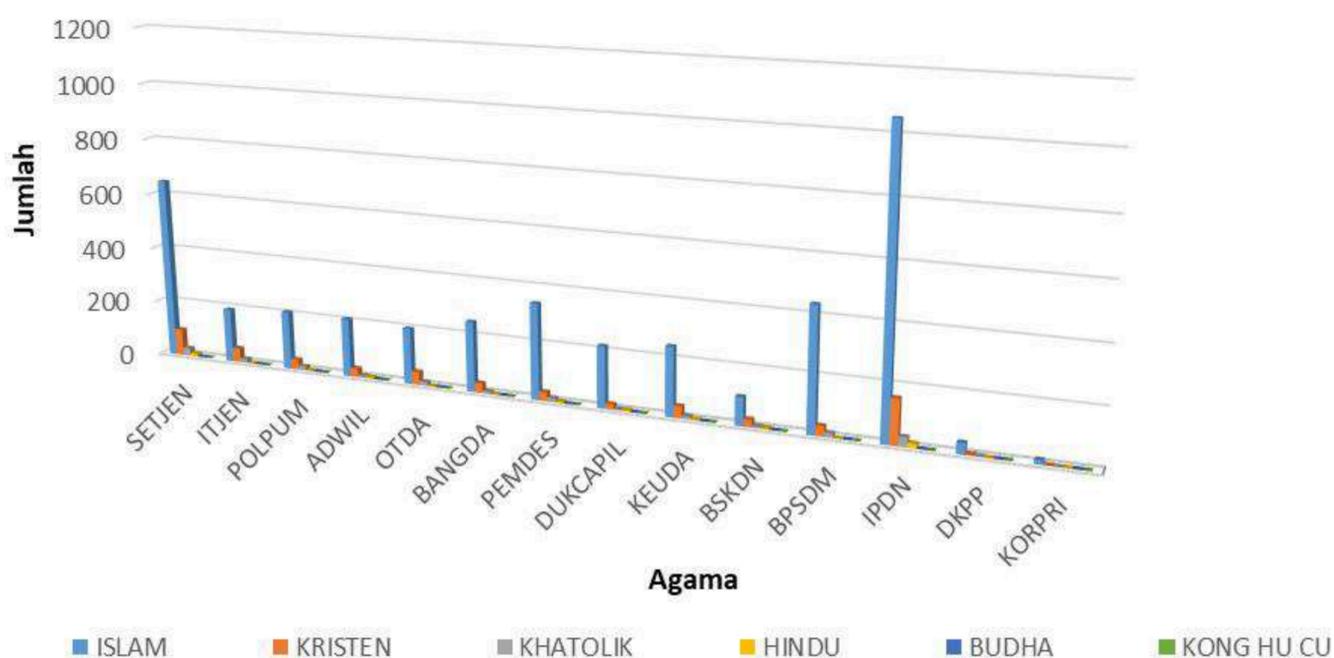
1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Agama Islam paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sejumlah 1052 orang, dan paling sedikit pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri dengan 15 orang.
2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Agama Kristen paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan 160 orang, dan paling sedikit pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI serta Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Kementerian Dalam Negeri (DKPP), masing-masing dengan 1 orang.
3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Agama Katolik paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan 34 orang,



4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Agama Buddha hanya terdapat pada unit kerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (ADWIL) sejumlah 1 orang.

5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Agama Hindu paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sejumlah 16 orang.

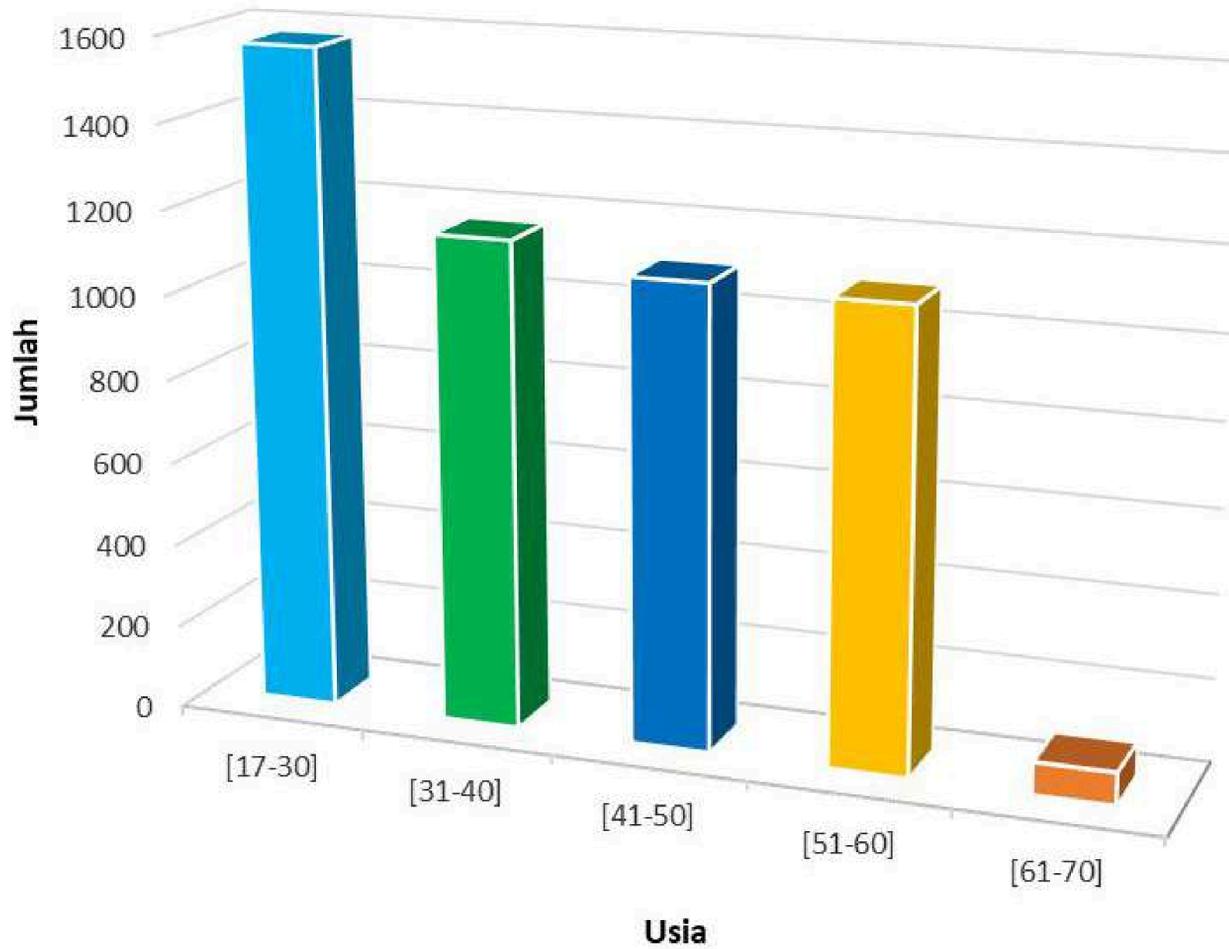
Kementerian Dalam Negeri



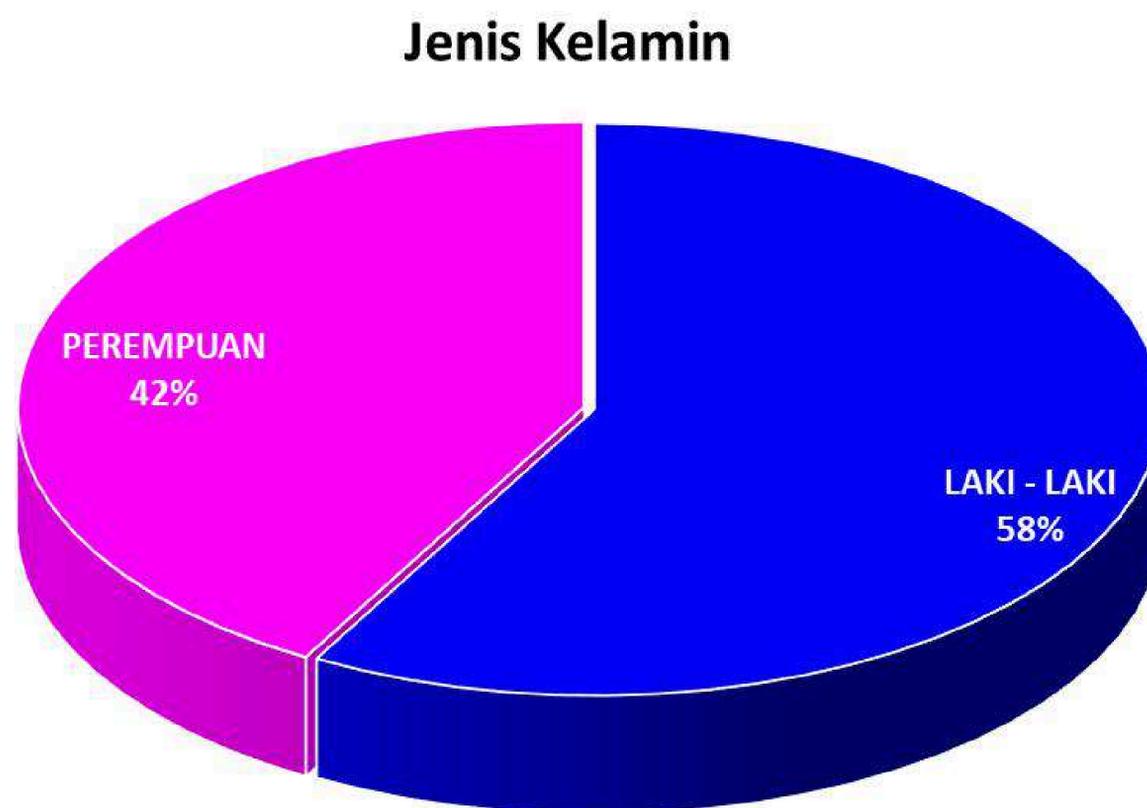


III. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

A. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelompok Usia



B. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

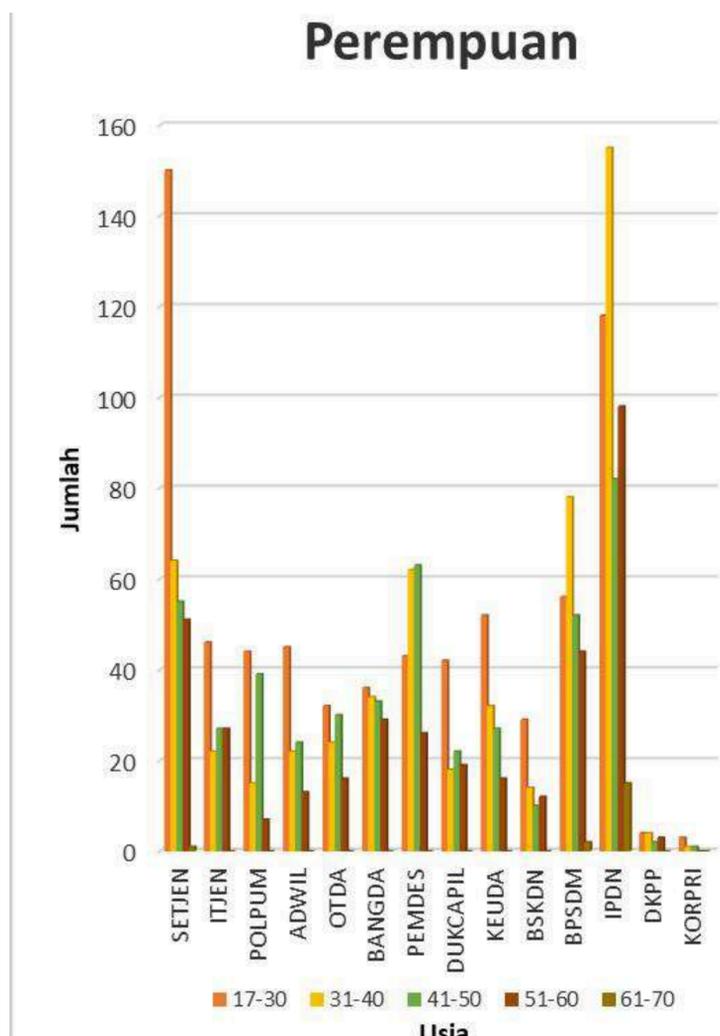
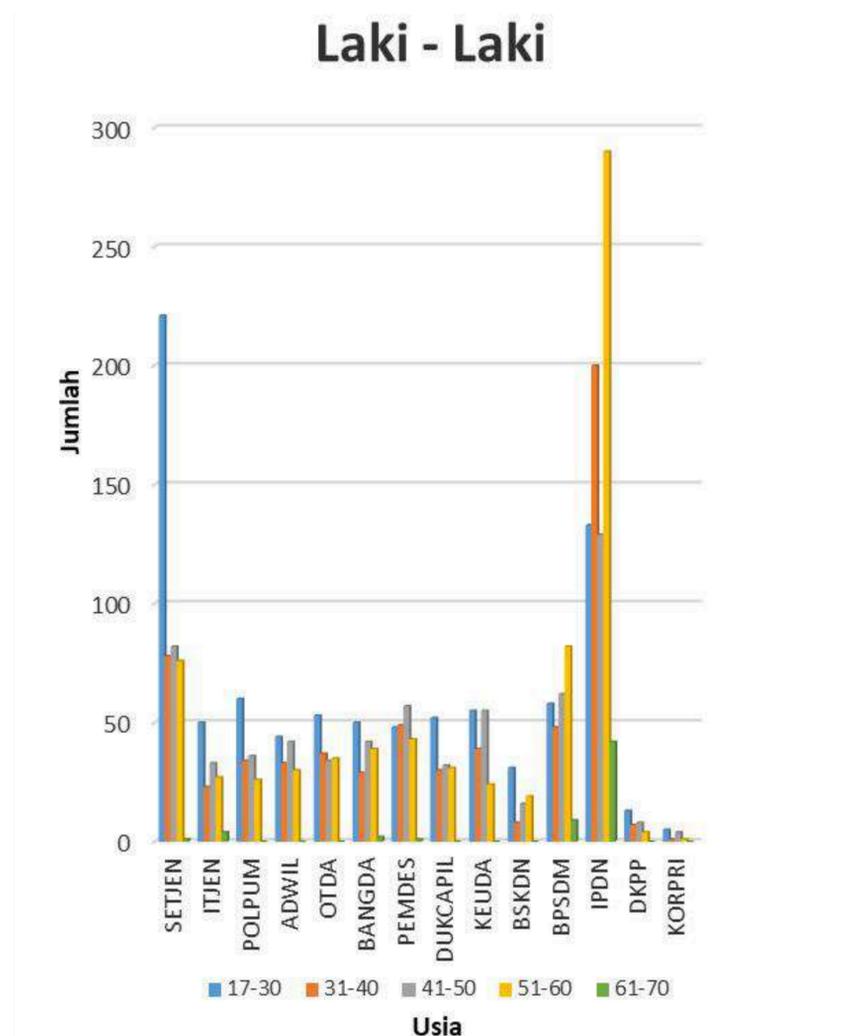




C. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

NO.	UNIT KERJA	USIA DALAM TAHUN										JUMLAH SELURUH	
		17-30		31-40		41-50		51-60		61-70			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	SEKRETARIAT JENDERAL :												
	BIRO PERENCANAAN	23	14	7	13	5	6	7	4	0	0	79	
	BIRO KEPEGAWAIAN	27	24	15	15	13	10	8	6	0	0	118	
	BIRO UMUM	22	17	10	7	14	7	19	12	0	1	109	
	BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA	17	8	4	11	4	3	8	7	0	0	62	
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	59	26	9	5	10	2	6	3	0	0	120	
	BIRO HUKUM	10	12	7	1	6	6	2	2	0	0	46	
	PUSAT FASILITASI KERJA SAMA	12	8	6	3	5	2	4	2	0	0	42	
	PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI	14	11	11	5	9	6	8	8	0	0	72	
	BIDANG HUKUM DAN KESATUAN BANGSA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	BIDANG KEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	STAF KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	4	
	PUSAT PENERANGAN	16	13	3	1	4	4	2	4	0	0	47	
	BIRO KEUANGAN DAN ASET	21	17	6	3	11	9	8	3	0	0	78	
2	INSPEKTORAT JENDERAL	50	46	23	22	33	27	27	27	4	0	259	
3	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	60	44	34	15	36	39	26	7	0	0	261	
4	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	44	45	33	22	42	24	30	13	0	0	253	
5	DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH	53	32	37	24	34	30	35	16	0	0	261	
6	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH	50	36	29	34	42	33	39	29	2	0	294	
7	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	48	43	49	62	57	63	43	26	1	0	392	
8	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52	42	30	18	32	22	31	19	0	0	246	
9	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	55	52	39	32	55	27	24	16	0	0	300	
10	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	31	29	8	14	16	10	19	12	0	0	139	
11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	58	56	48	78	62	52	82	44	9	2	491	
12	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	133	118	200	155	129	82	290	98	42	15	1262	
13	SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	13	4	7	4	8	2	4	3	0	0	45	
14	SEKRETARIAT PENGURUS KORPRI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	5	3	1	1	4	1	1	0	0	0	16	
	TOTAL	873	700	616	545	632	467	727	361	59	18	4998	

Untuk Grafik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelompok Usia di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Keadaan bulan Oktober 2024 dapat terlihat sebagai berikut:





Berdasarkan Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kelompok Usia Jenis Kelamin Laki-laki di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

1. Usia 17-30 tahun dengan jumlah laki-laki paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 221 orang dan jumlah laki-laki paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri sejumlah 5 orang.
2. Usia 31-40 tahun dengan jumlah laki-laki paling banyak terdapat pada IPDN sejumlah 200 orang dan jumlah laki-laki paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri sejumlah 1 orang.
3. Usia 41-50 tahun dengan jumlah laki-laki paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 129 orang dan jumlah laki-laki paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri sejumlah 4 orang.
4. Usia 51-60 tahun dengan jumlah laki-laki paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 290 orang dan jumlah laki-laki paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri sejumlah 1 orang.
5. Usia 61-70 tahun dengan jumlah laki-laki paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 42 orang dan jumlah laki-laki paling sedikit terdapat pada unit kerja, DitJen Polpum, DitJen Adwil, DitJen Otda, DitJen Dukcapil, DitJen Keuda, BSKDN, DKPP, dan KORPRI dengan jumlah masing-masing 0 orang.

Berdasarkan Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kelompok Jenis Kelamin Perempuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

1. Usia 17-30 tahun dengan jumlah perempuan paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 150 orang dan jumlah perempuan paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat dan Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri sejumlah 3 orang.
2. Usia 31-40 tahun dengan jumlah perempuan paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 118 orang dan jumlah perempuan paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu serta Sekretariat dan Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri dengan jumlah masing-masing 1 orang.
3. Usia 41-50 tahun dengan jumlah perempuan paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 82 orang dan jumlah perempuan paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri sejumlah 1 orang.
4. Usia 51-60 tahun dengan jumlah perempuan paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 98 orang dan jumlah perempuan paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri dengan jumlah 0 orang.
5. Usia 61-70 tahun dengan jumlah perempuan paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 15 orang dan jumlah perempuan paling sedikit terdapat pada beberapa unit kerja yaitu Sekretariat Jenderal sejumlah 2 orang.

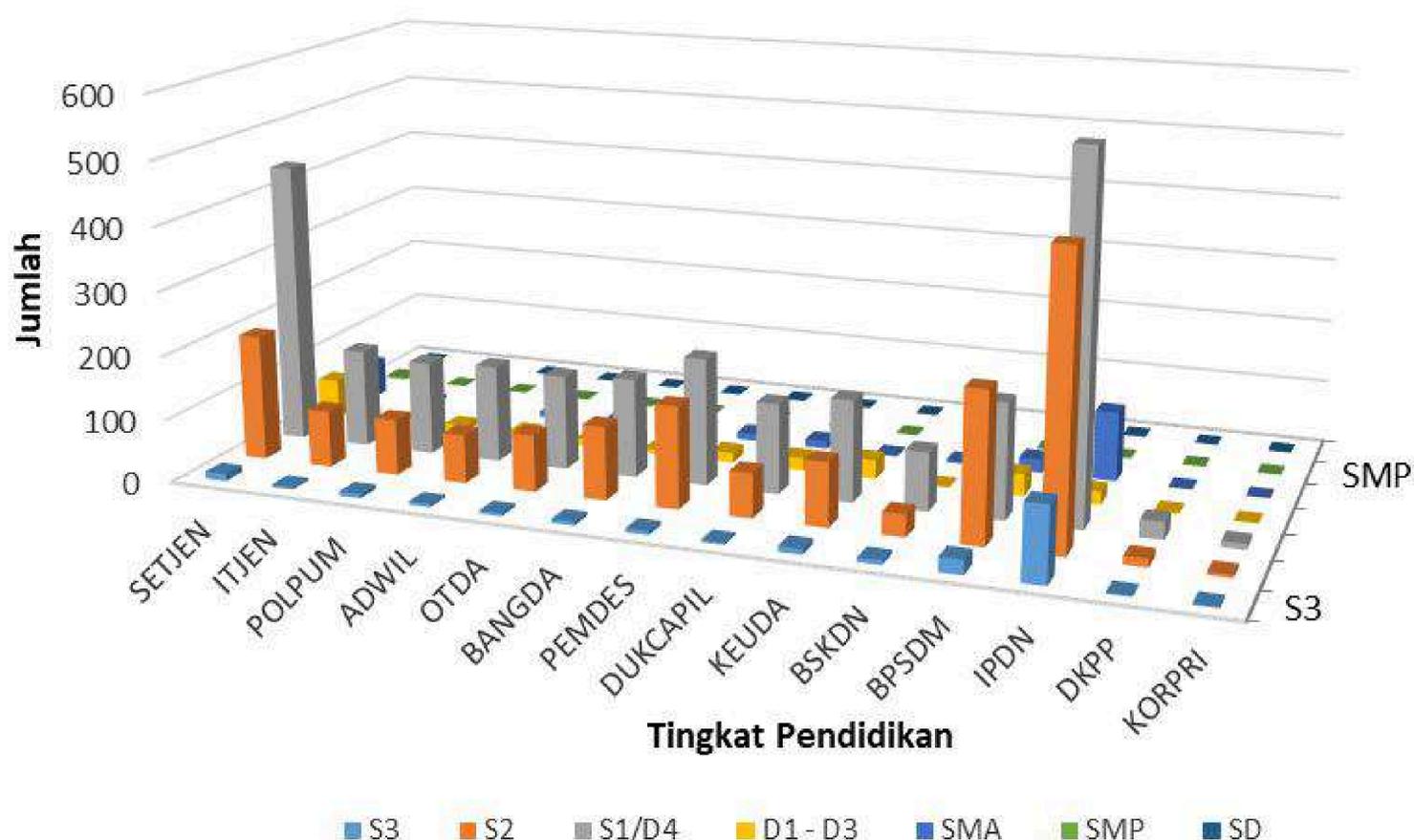


IV. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

A. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Umum Terakhir

NO.	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH SELURUH
		S3	S2	S1/D4	D1 - D3	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SEKRETARIAT JENDERAL :								
	BIRO PERENCANAAN	1	18	47	8	5	0	0	79
	BIRO KEPEGAWAIAN	2	33	76	4	1	1	1	118
	BIRO UMUM	0	23	48	15	20	2	1	109
	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	0	16	32	4	9	1	0	62
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	1	21	86	2	10	0	0	120
	BIRO HUKUM	0	19	24	3	0	0	0	46
	PUSAT FASILITASI KERJA SAMA	1	18	20	1	2	0	0	42
	PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI	0	21	42	2	7	0	0	72
	BIDANG HUKUM DAN KESATUAN BANGSA	0	1	0	0	0	0	0	1
	BIDANG KEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	0	1	0	0	0	0	0	1
	STAF KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI	4	0	0	0	0	0	0	4
	PUSAT PENERANGAN	1	10	32	4	0	0	0	47
	BIRO KEUANGAN DAN ASET	1	17	36	19	5	0	0	78
2	INSPEKTORAT JENDERAL	4	89	154	7	5	0	0	259
3	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	7	88	146	10	10	0	0	261
4	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	5	76	152	11	9	0	0	253
5	DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH	5	89	148	11	8	0	0	261
6	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH	6	115	155	6	12	0	0	294
7	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	6	159	199	16	11	0	1	392
8	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3	70	141	20	12	0	0	246
9	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	9	100	159	30	2	0	0	300
10	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	7	35	92	1	4	0	0	139
11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	23	233	180	34	21	0	0	491
12	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	117	449	565	21	109	0	1	1262
13	SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	2	13	27	2	1	0	0	45
14	SEKRETARIAT PENGURUS KORPRI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2	5	9	0	0	0	0	16
	TOTAL	207	1719	2570	231	263	4	4	4998

Untuk grafik jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan Umum per Unit Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri keadaan bulan Oktober 2024 dapat terlihat sebagai berikut :





Berdasarkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan Umum adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai lulusan S3 paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 117 orang dan jumlah pegawai lulusan S3 paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri dengan masing-masing 2 orang.
2. Jumlah pegawai lulusan S2 paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 449 orang dan jumlah pegawai lulusan S2 paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri sejumlah 5 orang.
3. Jumlah pegawai lulusan S1/DIV paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 565 orang dan jumlah pegawai lulusan S1/DIV paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri sejumlah 9 orang.
4. Jumlah pegawai lulusan D1-D3 paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 43 orang dan tidak terdapat pegawai lulusan D1-D3 pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri.
5. Jumlah pegawai lulusan SMA paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 109 orang dan jumlah pegawai lulusan SMA paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sejumlah 1 orang.
6. Jumlah pegawai lulusan SMP hanya terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 4 orang.
7. Jumlah pegawai lulusan SD hanya terdapat pada tiga unit kerja, yaitu Sekretariat Jenderal (1 orang), Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (1 orang), dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (1 orang).

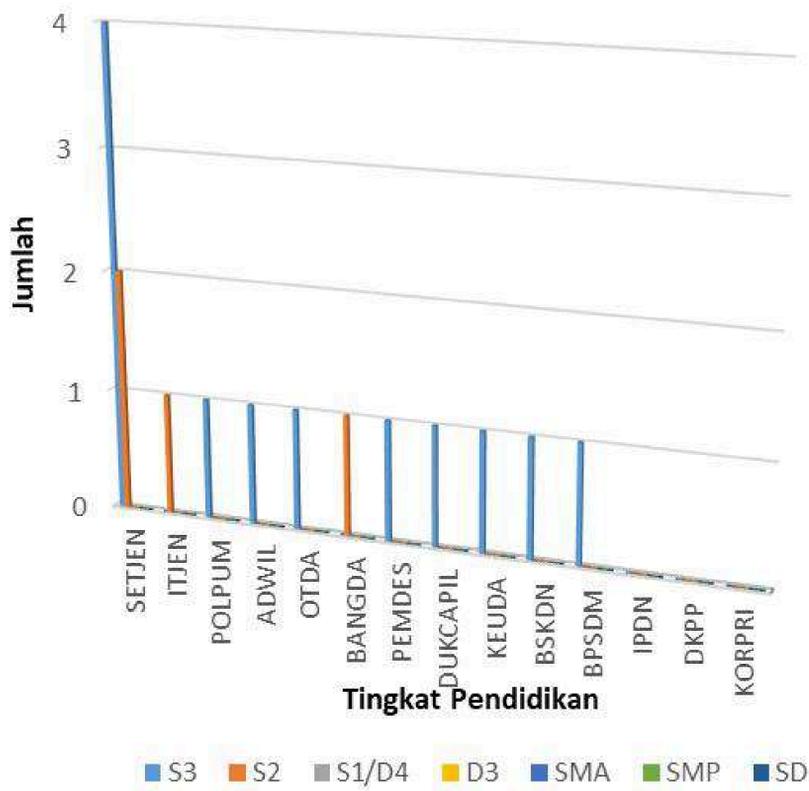


B. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan Struktural dan Tingkat Pendidikan Terakhir

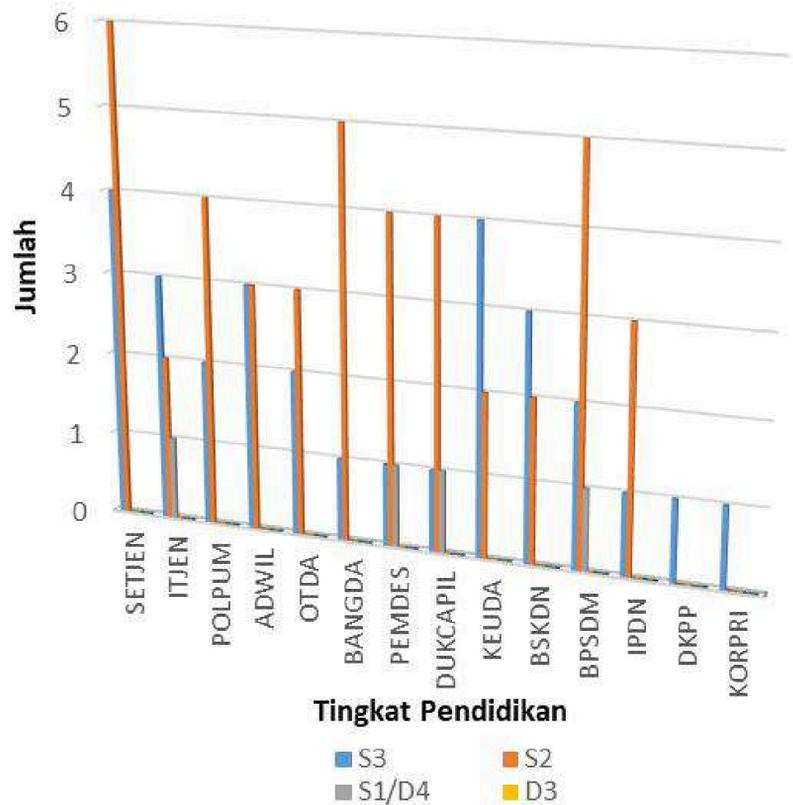
NO.	UNIT KERJA	PIMPINAN TINGGI MADYA							PIMPINAN TINGGI PRATAMA							ADMINISTRATOR							PENGAWAS							TOTAL JUMLAH											
		S3	S2	S1/D4	D1 - D3	SMA	SMP	SD	JML	S3	S2	S1/D4	D1 - D3	SMA	SMP	SD	JML	S3	S2	S1/D4	D1 - D3	SMA	SMP	SD	JML	S3	S2	S1/D4	D1 - D3		SMA	SMP	SD	JML							
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIRO PERENCANAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
	BIRO KEPEGAWAIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	4	0	2	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8
	BIRO UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	3	0	3	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	9
	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	4	0	3	6	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	14
	BIRO HUKUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
	PUSAT FASILITASI KERJA SAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
	PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
	BIDANG HUKUM DAN KESATUAN BANGSA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	BIDANG PEMERINTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIDANG KEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	BIDANG APARATUR DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	STAF KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	PUSAT PENERANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	BIRO KEUANGAN DAN ASET	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	3	0	6	2	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	12
2	INSPEKTORAT JENDERAL	0	1	0	0	0	0	0	1	3	2	1	0	0	0	0	6	0	3	1	0	0	0	0	4	0	5	4	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	20
3	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	1	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	0	0	0	0	6	0	11	4	0	0	0	0	15	0	8	3	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	33
4	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0	0	6	1	13	2	0	0	0	0	16	0	5	4	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	32
5	DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	5	0	12	4	0	0	0	0	16	0	6	4	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	33
6	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH	0	1	0	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	6	2	12	2	0	0	0	0	16	0	4	6	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	33
7	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	0	0	0	0	6	1	16	2	0	0	0	0	19	0	8	6	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	40
8	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	0	0	0	0	6	1	15	0	0	0	0	0	16	0	4	4	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	31
9	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	1	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	0	6	1	14	2	0	0	0	0	17	0	7	4	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	35
10	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	1	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	5	1	3	0	0	0	0	0	4	0	7	2	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	19
11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	0	0	0	0	0	0	1	2	5	1	0	0	0	0	8	2	6	1	0	0	0	0	9	0	14	9	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	41
12	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	4	2	13	2	0	0	0	0	17	1	19	10	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	51
13	SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	0	0	0	0	6	0	6	6	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	20
14	SEKRETARIAT PENGURUS KORPRI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	3	0	3	3	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	10
	TOTAL	12	4	0	0	0	0	0	16	29	43	4	0	0	0	0	76	14	147	25	0	0	0	0	186	1	115	78	2	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0	474

Untuk grafik jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan Umum per Unit Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri keadaan Tahun 2024 dapat terlihat sebagai berikut :

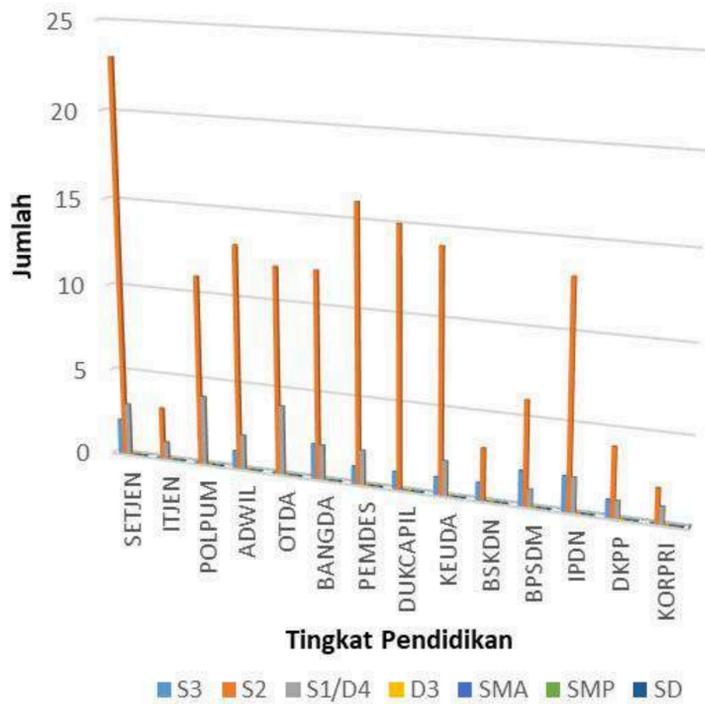
Pimpinan Tinggi Madya



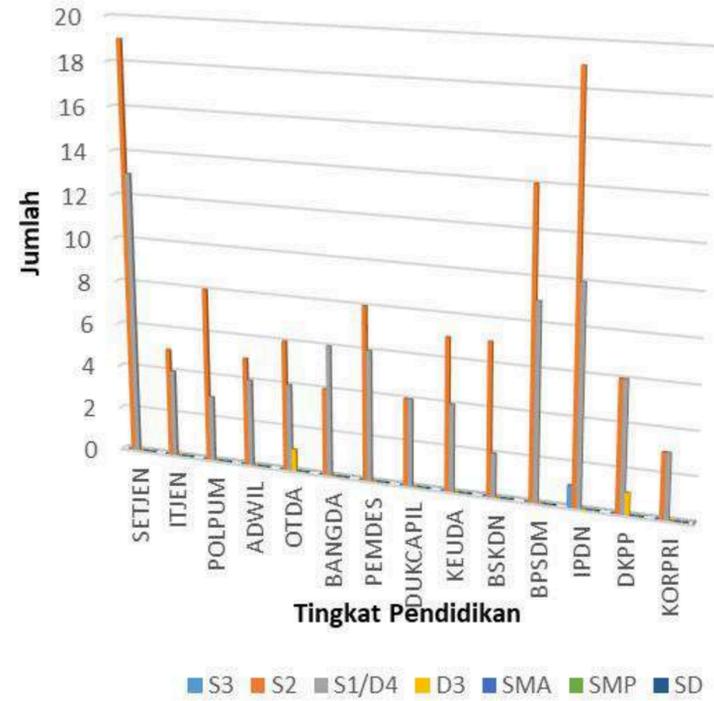
Pimpinan Tinggi Pratama



Administrator



Pengawas



Berdasarkan Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pimpinan Tinggi Madya dan Tingkat Pendidikan Umum adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pimpinan Tinggi Madya dengan tingkat pendidikan umum lulusan S3 paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 4 orang, dan unit kerja yang tidak terdapat lulusan S3 pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta Sekretariat Pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri.
2. Jumlah Pimpinan Tinggi Madya dengan tingkat pendidikan umum lulusan S2 hanya terdapat pada dua unit kerja, yakni Sekretariat Jenderal sejumlah 2 orang dan Inspektorat Jenderal serta Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah masing-masing 1 orang.

Berdasarkan Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pimpinan Tinggi Pratama dan Tingkat Pendidikan Umum adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai lulusan S3 paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sejumlah 4 orang, dan jumlah S3 paling sedikit terdapat pada unit kerja

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Sekretariat Pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri, masing-masing sejumlah 1 orang.

2. Jumlah pegawai lulusan S2 paling banyak terdapat pada unit kerja Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sejumlah 5 orang, dan jumlah S2 yang tidak terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
3. Jumlah pegawai lulusan S1/DIV hanya terdapat pada empat unit kerja: Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan jumlah masing-masing 1 orang.



Berdasarkan Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil Administrator dengan jumlah Tingkat Pendidikan Umum adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai lulusan S3 paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, masing-masing sejumlah 2 orang, dan S3 tidak terdapat pada unit kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, serta Sekretariat Pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri.
2. Jumlah pegawai lulusan S2 paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 23 orang, dan jumlah S2 paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri sejumlah 2 orang.
3. Jumlah pegawai lulusan S1/DIV paling banyak terdapat pada unit kerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dengan jumlah masing-masing 4 orang, dan S1/DIV tidak terdapat pada unit kerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri serta Sekretariat Pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri.

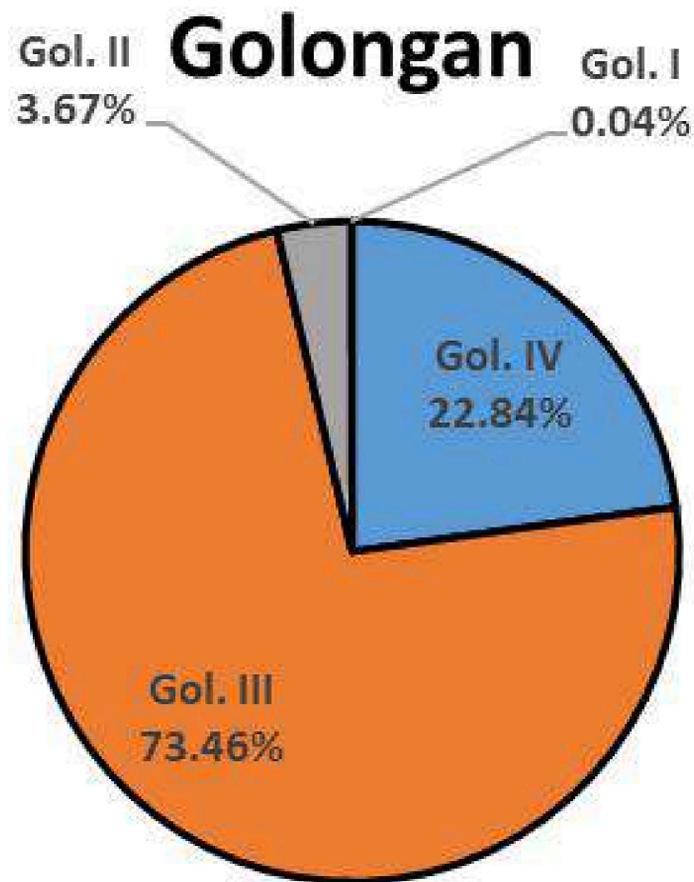
Berdasarkan Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pengawas dengan jumlah Tingkat Pendidikan Umum adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai lulusan S2 paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 19 orang, dan jumlah S2 paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri sejumlah 3 orang.
2. Jumlah pegawai lulusan S1/DIV paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 13 orang, dan jumlah S1/DIV paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri sejumlah 3 orang.
3. Jumlah pegawai lulusan D3 hanya terdapat pada 2 unit kerja, yaitu Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sejumlah 1 orang dan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sejumlah 1 orang, dan unit kerja lain tidak terdapat pegawai lulusan D3.



V. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

A. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan Ruang

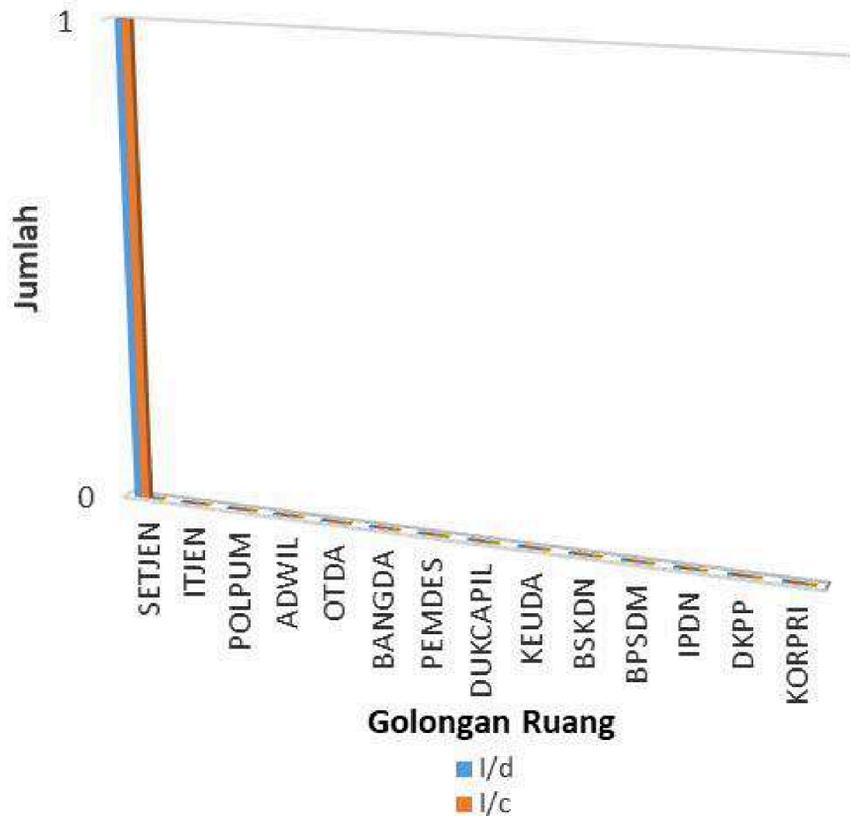


Data rinci Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

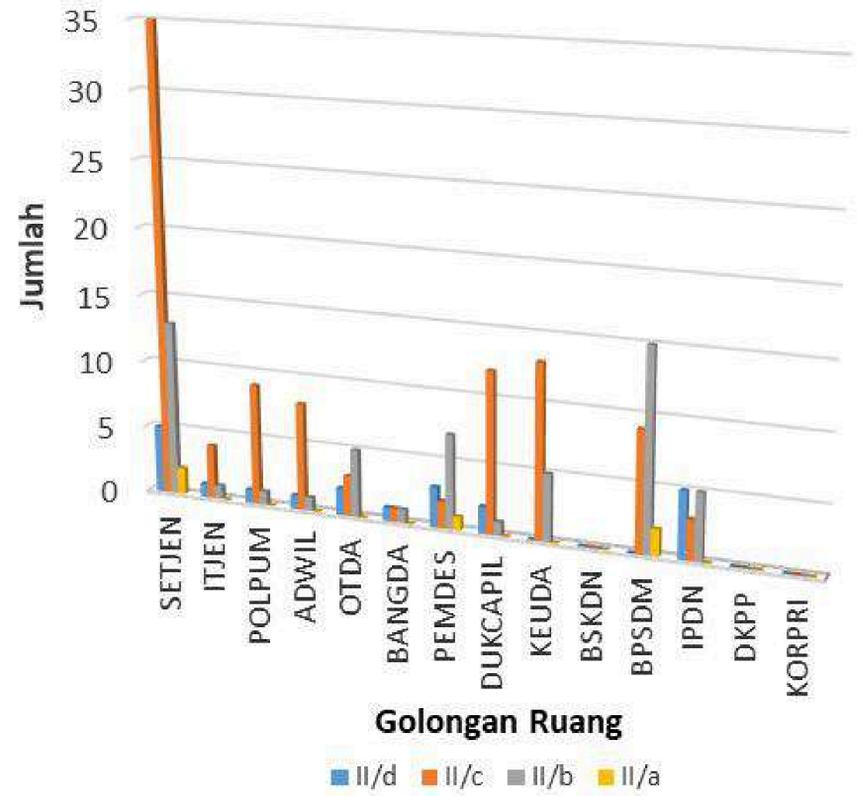
NO.	UNIT KERJA	GOLONGAN RUANG																							TOTAL JUMLA H	
		IV						III						II						I						TNI/POL RI
		E	D	C	B	A	JML	D	C	B	A	JML	D	C	B	A	JM	D	C	B	A	JM				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	SEKRETARIAT JENDERAL :																									
	BIRO PERENCANAAN	0	1	0	4	2	7	15	10	12	22	59	0	7	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0		
	BIRO KEPEGAWAIAN	0	0	2	7	9	18	22	20	22	28	92	1	3	1	0	5	1	0	0	0	0	1	0		
	BIRO UMUM	1	1	2	4	8	16	13	10	24	20	67	2	10	2	2	16	0	1	0	0	0	1	2		
	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	0	0	1	3	5	9	7	6	24	14	51	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	0	1	0	0	4	5	6	17	46	44	113	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
	BIRO HUKUM	0	1	0	3	3	7	8	5	8	12	33	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
	PUSAT FASILITASI KERJA SAMA	0	0	1	3	4	8	6	7	8	12	33	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI	0	0	1	3	8	12	12	5	20	14	51	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	BIDANG HUKUM DAN KESATUAN BANGSA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	BIDANG KEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	STAF KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
	PUSAT PENERANGAN	0	1	0	2	6	9	6	2	11	16	35	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0		
	BIRO KEUANGAN DAN ASET	0	1	0	4	5	10	16	6	12	19	53	1	11	3	0	15	0	0	0	0	0	0	0		
2	INSPEKTORAT JENDERAL	0	12	10	19	18	59	52	30	34	73	189	1	4	1	0	6	0	0	0	0	0	0	2		
3	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	0	4	3	17	33	57	51	38	49	51	189	1	9	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0		
4	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	0	4	2	19	24	49	64	29	43	50	186	1	8	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0		
5	DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH	1	3	2	19	36	61	65	22	50	49	186	2	3	5	0	10	0	0	0	0	0	0	0		
6	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1	5	5	25	33	69	77	28	41	72	218	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0		
7	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	1	3	8	22	50	84	132	38	57	67	294	3	2	7	1	13	0	0	0	0	0	0	0		
8	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	4	3	22	18	48	49	32	44	58	183	2	12	1	0	15	0	0	0	0	0	0	0		
9	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	1	4	5	23	31	64	67	33	60	54	214	0	13	5	0	18	0	0	0	0	0	0	0		
10	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	1	4	2	12	12	31	19	12	23	53	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6	14	30	27	77	154	117	67	82	41	307	0	9	15	2	26	0	0	0	0	0	0	0		
12	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	18	21	33	87	171	330	278	232	253	132	895	5	3	5	0	13	0	0	0	0	0	0	2		
13	SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	0	1	0	4	3	8	14	4	4	15	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	SEKRETARIAT PENGURUS KORPRI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	0	0	0	1	1	2	3	4	3	4	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	TOTAL	35	85	110	330	561	1121	1099	657	930	920	3606	21	99	55	5	180	1	1	0	0	2	8	4917		

Untuk grafik jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan Ruang per Unit Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri keadaan bulan Oktober 2024 dapat terlihat sebagai berikut :

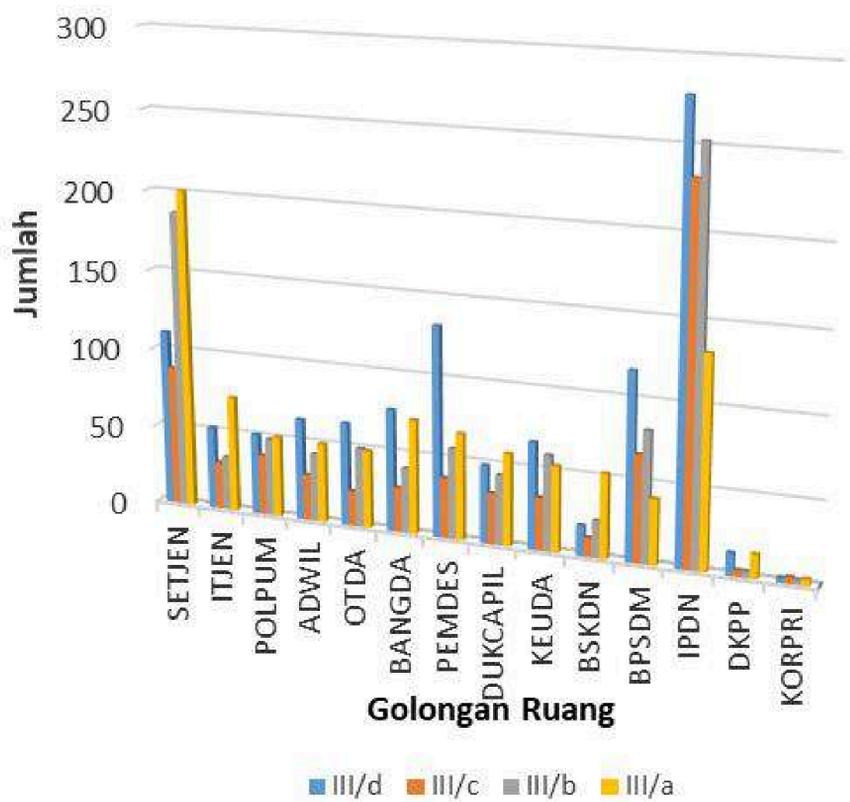
Golongan I



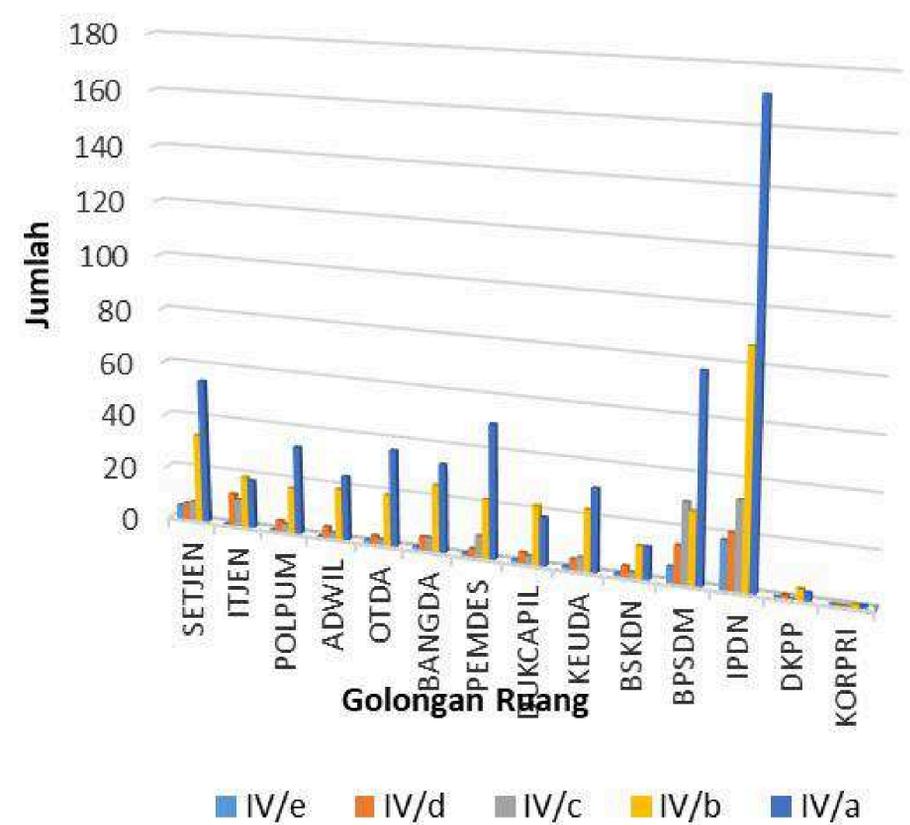
Golongan II



Golongan III



Golongan IV





Berdasarkan Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan IV adalah sebagai berikut :

1. Golongan Ruang IV/e paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 18 orang, dan Golongan Ruang IV/e tidak terdapat pada unit kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah, Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Sekretariat Pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri.
2. Golongan Ruang IV/d paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 21 orang, dan Golongan Ruang IV/d tidak terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri.
3. Golongan Ruang IV/c paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 33 orang, dan Golongan Ruang IV/c tidak terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri serta Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
4. Golongan Ruang IV/b paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 87 orang, dan Golongan Ruang IV/b paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri sejumlah 1 orang.
5. Golongan Ruang IV/a paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 171 orang, dan Golongan Ruang IV/a paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri sejumlah 1 orang.

Berdasarkan Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan III adalah sebagai berikut :

1. Golongan Ruang III/d paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 278 orang dan Golongan Ruang III/d paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri sejumlah 3 orang.
2. Golongan Ruang III/c paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 232 orang.

3. Golongan Ruang III/b paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 253 orang dan Golongan Ruang III/b paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri, masing-masing sejumlah 4 dan 3 orang.
4. Golongan Ruang III/a paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 201 orang dan Golongan Ruang III/a paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri sejumlah 4 orang.

Berdasarkan Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan II adalah sebagai berikut :

1. Golongan Ruang II/d paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 5 orang, dan Golongan Ruang II/d tidak terdapat pada unit kerja Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri.
2. Golongan Ruang II/c paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 35 orang, dan Golongan Ruang II/c tidak terdapat pada unit kerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, serta Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
3. Golongan Ruang II/b tersebar pada unit kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, masing-masing sejumlah 13 orang dan 5 orang, serta unit kerja lainnya dengan jumlah yang lebih sedikit.
4. Golongan Ruang II/a paling banyak terdapat pada unit kerja BPSDM sejumlah 15 orang, dan Golongan Ruang II/a tidak terdapat pada unit kerja Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri.
5. Golongan Ruang I/d terdapat 1 orang di Sekretariat Jenderal, dan tidak ada di unit kerja lainnya.



Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan Struktural dan Golongan Ruang

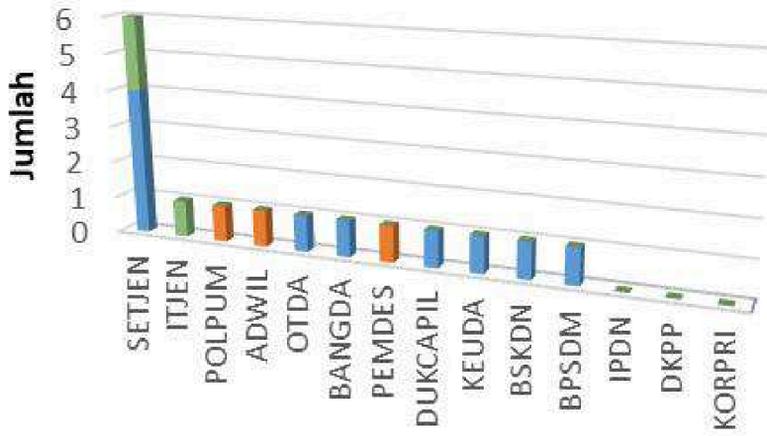
NO.	UNIT KERJA	PIMPINAN TINGGI MADYA																	PIMPINAN TINGGI PRATAMA																				
		IV/e	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	TNI/POL RI	JM L	IV/e	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	TNI/POL RI	JM L
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIRO PERENCANAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	BIRO KEPEGAWAIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	BIRO UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	BIRO HUKUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	PUSAT FASILITASI KERJA SAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	BIDANG HUKUM DAN KESATUAN BANGSA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BIDANG PEMERINTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BIDANG KEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BIDANG APARATUR DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	STAF KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PUSAT PENERANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	BIRO KEUANGAN DAN ASET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
2	INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6		
3	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
4	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
5	DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
6	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
7	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
8	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
9	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
10	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8		
12	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
13	SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
14	SEKRETARIAT PENGURUS KORPRI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	TOTAL	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	0	39	29	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	76			

NO.	UNIT KERJA	ADMINISTRATOR																	PENGAWAS																	TOTAL JUMLAH			
		IV/e	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	JM L	IV/e	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b		I/a	JML	
1	2	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIRO PERENCANAAN	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	
	BIRO KEPEGAWAIAN	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	
	BIRO UMUM	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	
	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14	
	BIRO HUKUM	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	
	PUSAT FASILITASI KERJA SAMA	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	
	PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	
	BIDANG HUKUM DAN KESATUAN BANGSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	BIDANG PEMERINTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BIDANG KEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															



Untuk grafik jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselon dan Golongan Ruang per Unit Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri keadaan bulan Oktober 2024 dapat terlihat sebagai berikut :

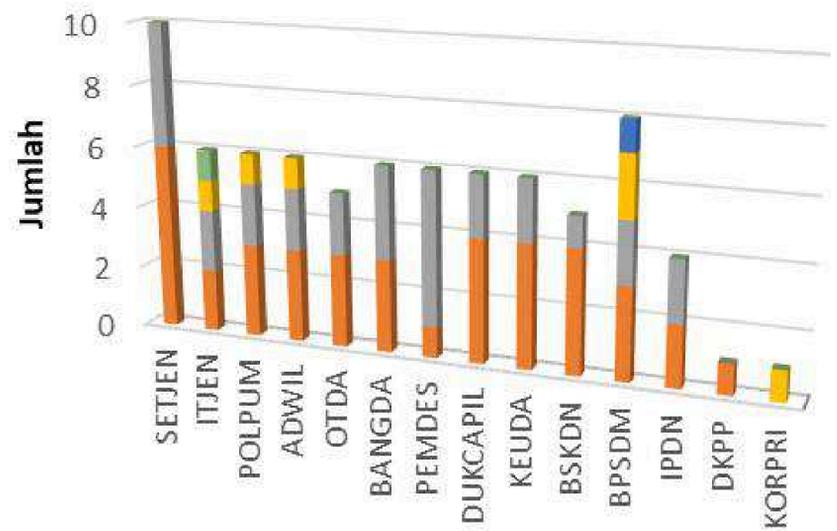
Pimpinan Tinggi Madya



Golongan Ruang

- IV/e
- IV/d
- IV/c
- IV/b
- IV/a
- III/d
- III/c
- III/b
- III/a
- II/d
- II/c
- II/b
- II/a
- I/d
- I/c
- I/b
- I/a
- TNI/POLRI

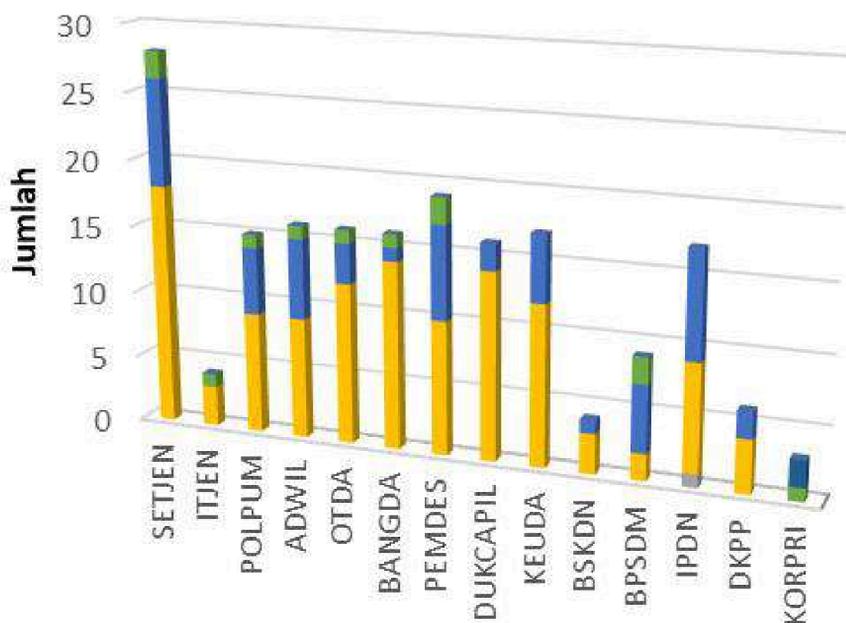
Pimpinan Tinggi Pratama



Golongan Ruang

- IV/e
- IV/d
- IV/c
- IV/b
- IV/a
- III/d
- III/c
- III/b
- III/a
- II/d
- II/c
- II/b
- II/a
- I/d
- I/c
- I/b
- I/a
- TNI/POLRI

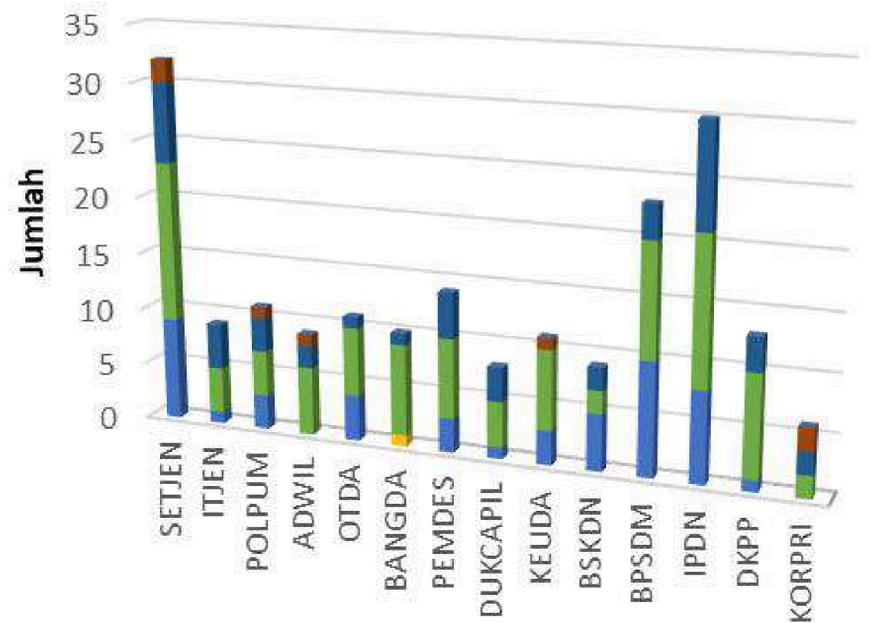
Administrator



Golongan Ruang

- IV/e
- IV/d
- IV/c
- IV/b
- IV/a
- III/d
- III/c
- III/b
- III/a
- II/d
- II/c
- II/b
- II/a
- I/d
- I/c
- I/b
- I/a

Pengawas



Golongan Ruang

- IV/e
- IV/d
- IV/c
- IV/b
- IV/a
- III/d
- III/c
- III/b
- III/a
- II/d
- II/c
- II/b
- II/a
- I/d
- I/c
- I/b
- I/a

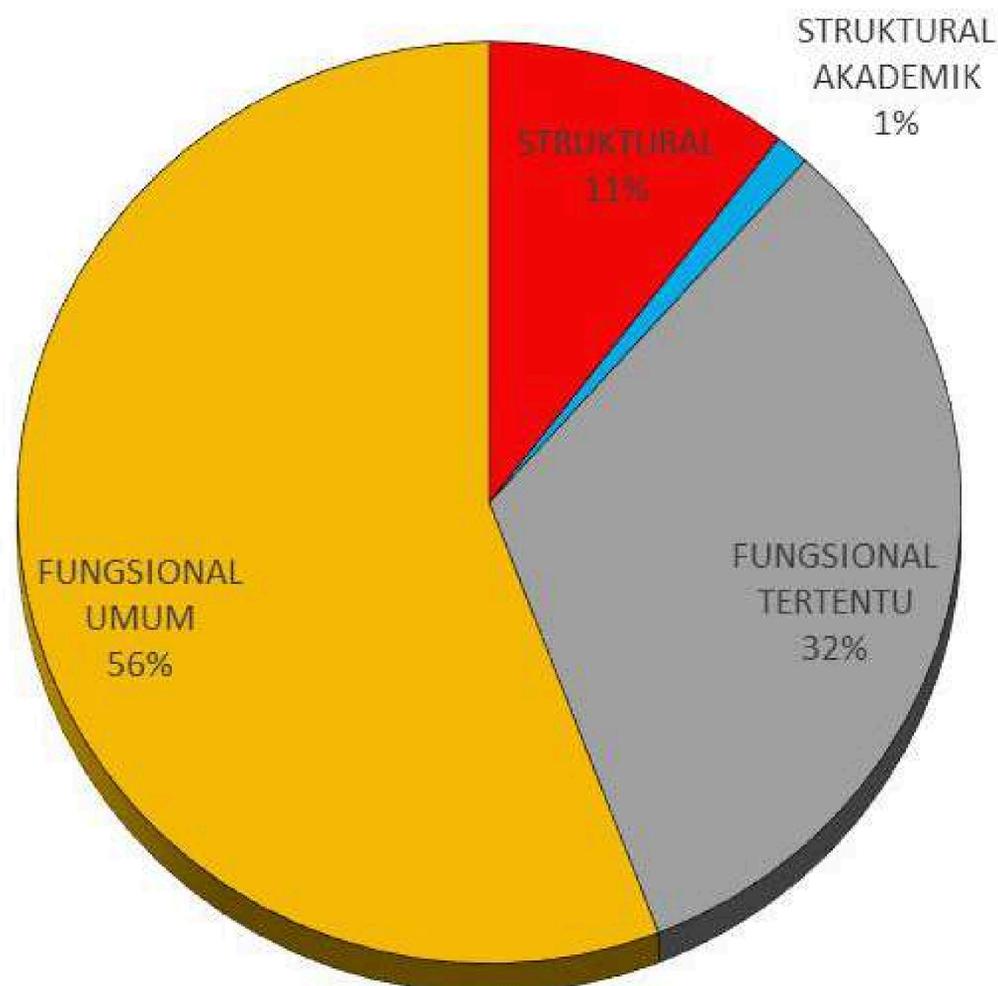
Berdasarkan Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan Pimpinan Tinggi dengan Golongan IV adalah sebagai berikut :

1. Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi Madya dengan golongan ruang IV/e berjumlah 10 orang dan paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 4 orang, golongan ruang IV/d berjumlah 3 orang, golongan ruang IV/c tidak ada, golongan ruang IV/b berjumlah 1 orang pada unit kerja Politik dan Pemerintahan Umum, dan golongan ruang IV/a tidak ada.
2. Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama hanya terdapat pada golongan ruang IV/d berjumlah 39 orang, golongan ruang IV/c berjumlah 29 orang, golongan ruang IV/b berjumlah 6 orang, dan golongan ruang IV/a berjumlah 1 orang.

3. Jumlah jabatan Administrator dengan Golongan IV dan Golongan III terdapat pada golongan ruang IV/c berjumlah 1 orang, golongan ruang IV/b berjumlah 118 orang, golongan ruang IV/a berjumlah 53 orang, golongan ruang III/d berjumlah 12 orang, dan golongan ruang III/c berjumlah 2 orang.
4. Jumlah Jabatan Pengawas dengan Golongan IV dan Golongan III terdapat pada golongan ruang IV/b berjumlah 1 orang yang terdapat pada unit kerja Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, golongan ruang IV/a berjumlah 48 orang, golongan ruang III/d berjumlah 96 orang dengan unit kerja terbanyak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sejumlah 10 orang, golongan ruang III/c berjumlah 44 orang, dan golongan ruang III/b berjumlah 7 orang.

B. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan

Jenis Jabatan

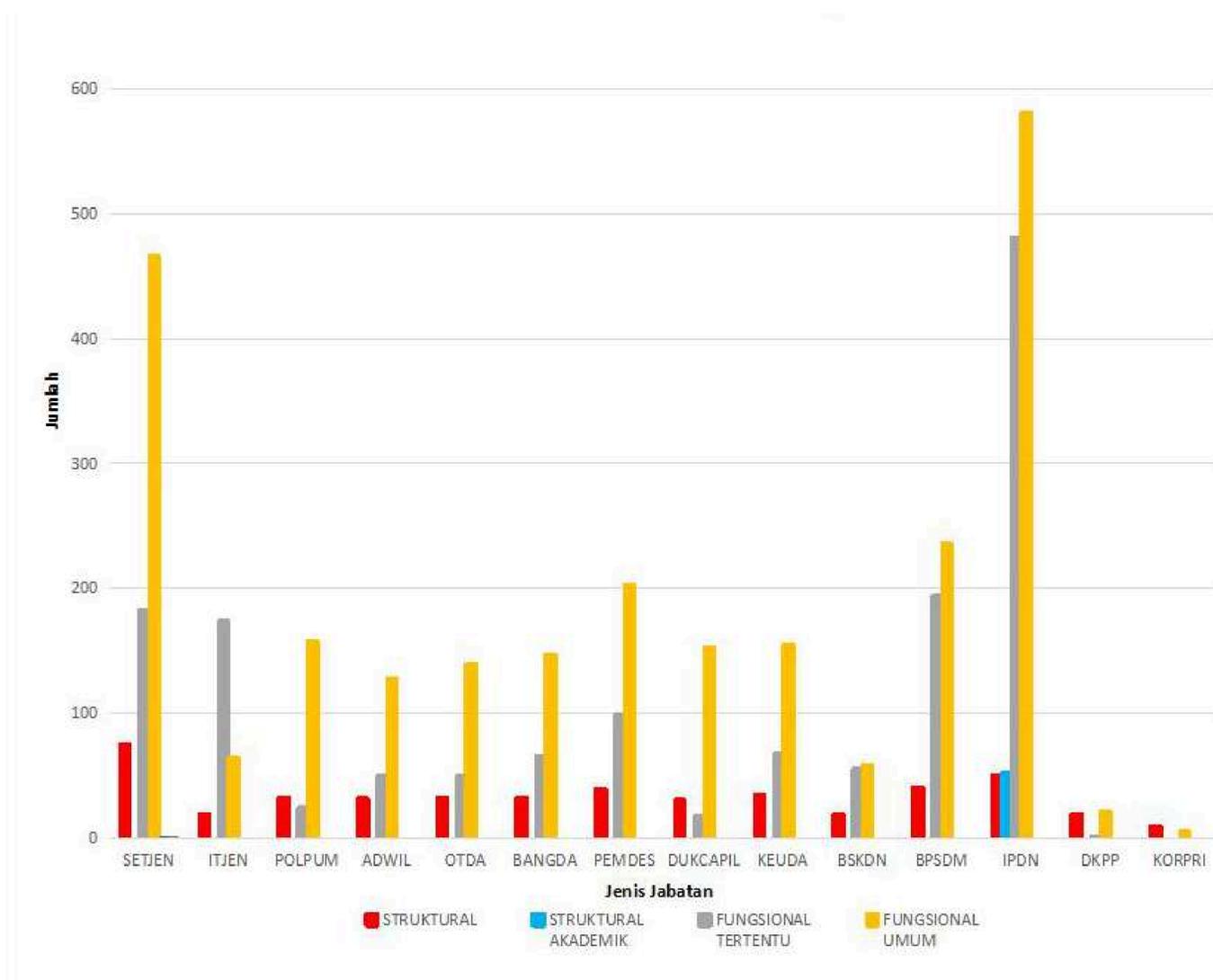




C. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan Struktural dan Tingkat Pendidikan Terakhir

NO.	UNIT KERJA	STRUKTURAL	STRUKTURAL AKADEMIK	FUNGSIONAL TERTENTU	FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH
1	SETJEN	76	0	183	466	725
2	ITJEN	20	0	174	65	259
3	POLPUM	33	0	25	158	216
4	ADWIL	32	0	50	128	210
5	OTDA	33	0	50	140	223
6	BANGDA	33	0	66	147	246
7	PEMDES	40	0	99	203	342
8	DUKCAPIL	31	0	18	153	202
9	KEUDA	35	0	68	155	258
10	BSKDN	19	0	56	59	134
11	BPSDM	41	0	194	236	471
12	IPDN	51	53	481	581	1166
13	DKPP	20	0	1	22	43
14	KORPRI	10	0	0	6	16
TOTAL		474	53	1465	2519	4511

Untuk grafik jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Jabatan per Unit Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri keadaan tahun 2024 dapat terlihat sebagai berikut :



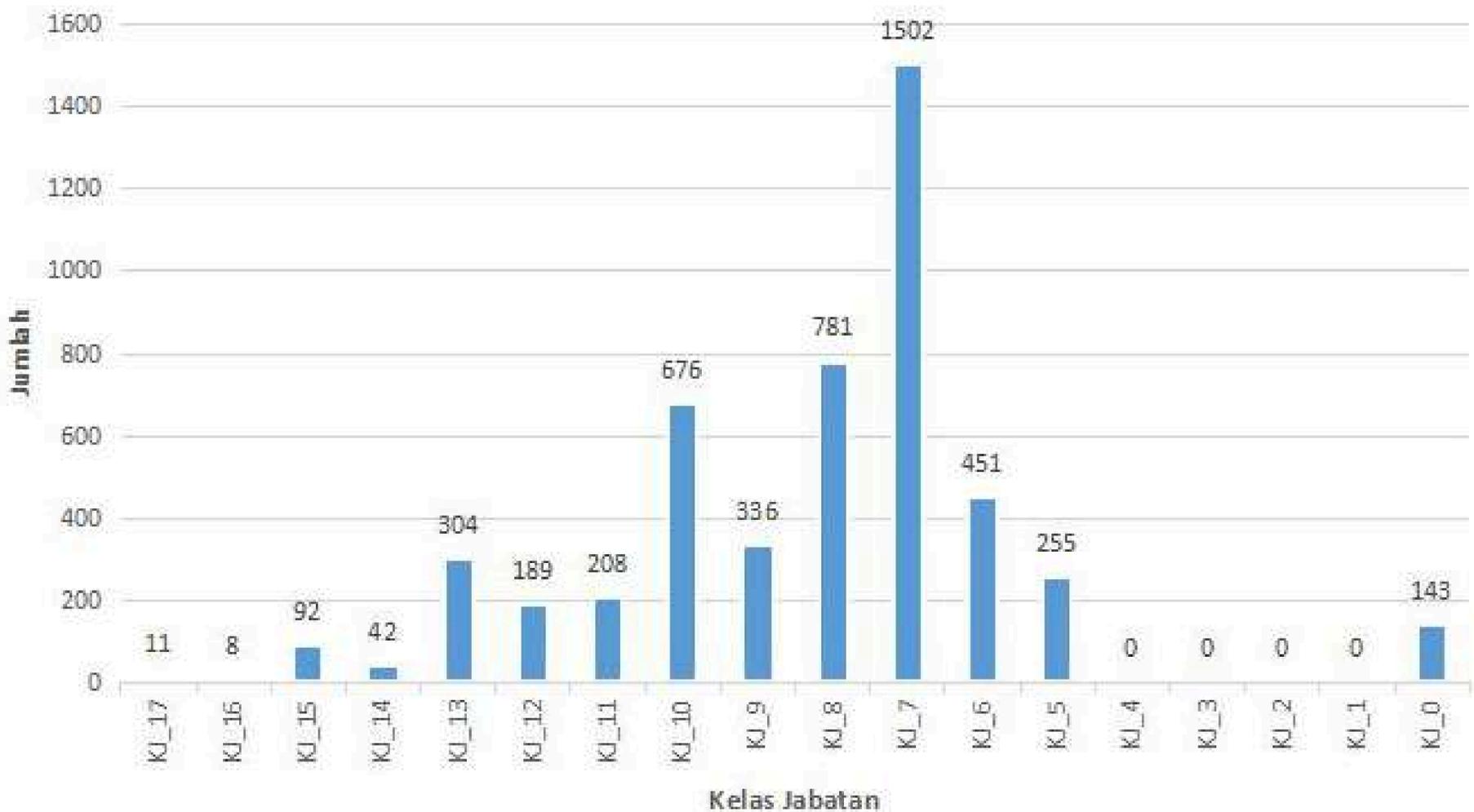


Berdasarkan Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Jabatan adalah sebagai berikut :

1. Jabatan Struktural paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 76 orang dan Jabatan Struktural paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri sejumlah 10 orang.
2. Jabatan Struktural Akademik hanya terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 53 orang.
3. Jabatan Fungsional Tertentu paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 481 orang dan Jabatan Fungsional Tertentu tidak terdapat pada unit kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri.

4. Jabatan Fungsional Umum paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 581 orang dan Jabatan Fungsional Umum paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri sejumlah 6 orang.

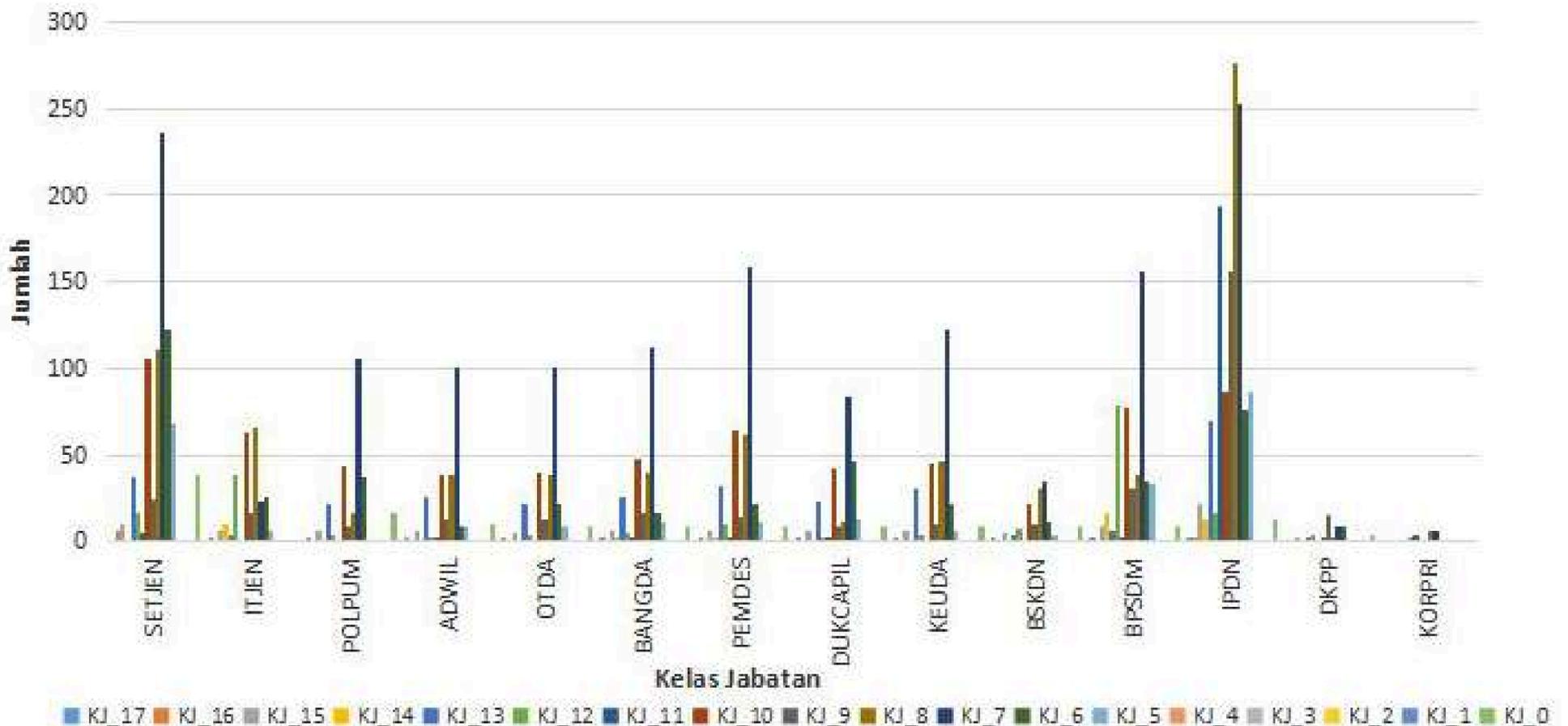
C. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan





NO.	UNIT KERJA	KELAS JABATAN																		JUMLAH (3 S/D 20)
		17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIRO PERENCANAAN	0	0	1	0	4	0	0	12	1	17	22	16	5	0	0	0	0	1	79
	BIRO KEPEGAWAIAN	0	0	1	0	4	8	3	20	9	34	20	8	3	0	0	0	0	8	118
	BIRO UMUM	0	0	1	0	5	4	0	12	1	15	24	20	24	0	0	0	0	3	109
	BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA	0	0	1	0	2	2	0	12	0	10	12	10	10	0	0	0	0	3	62
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	0	0	1	0	4	1	0	10	0	2	64	17	11	0	0	0	0	10	120
	BIRO HUKUM	0	0	1	0	4	0	0	5	5	8	15	6	0	0	0	0	0	2	46
	PUSAT FASILITASI KERJA SAMA	0	0	1	0	3	1	1	7	0	3	16	5	2	0	0	0	0	3	42
	PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI	0	0	1	0	4	0	1	8	6	15	23	6	5	0	0	0	0	3	72
	BIDANG HUKUM DAN KESATUAN BANGSA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	BIDANG PEMERINTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIDANG KEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	BIDANG APARATUR DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	STAF KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	PUSAT PENERANGAN	0	0	1	0	3	0	0	7	1	0	22	10	0	0	0	0	0	3	47
	BIRO KEUANGAN DAN ASET	0	0	1	0	4	0	0	12	1	7	18	24	8	0	0	0	0	3	78
2	INSPEKTORAT JENDERAL	1	0	6	10	4	38	0	63	17	65	23	26	6	0	0	0	0	259	
3	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	1	0	6	0	22	4	0	44	9	16	106	37	0	0	0	0	0	16	261
4	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1	0	6	0	26	1	1	39	13	38	100	9	9	0	0	0	0	10	253
5	DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH	1	0	5	0	22	3	0	40	13	38	100	22	8	0	0	0	0	9	261
6	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1	0	6	2	26	5	2	48	16	40	112	16	11	0	0	0	0	9	294
7	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	1	0	6	1	32	10	1	64	14	62	159	22	11	0	0	0	0	9	392
8	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	0	6	0	23	1	1	42	9	11	84	46	13	0	0	0	0	9	246
9	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	1	0	6	0	30	3	0	45	10	46	123	21	6	0	0	0	0	9	300
10	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	1	0	5	0	4	7	0	22	10	31	35	11	4	0	0	0	0	9	139
11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	0	8	17	6	79	1	77	30	39	156	35	33	0	0	0	0	9	491
12	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	1	2	21	12	70	17	194	86	156	276	253	76	86	0	0	0	0	12	1262
13	SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	0	0	1	0	2	4	0	1	15	2	9	8	0	0	0	0	0	3	45
14	SEKRETARIAT PENGURUS KORPRI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	0	0	0	0	0	1	3	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	16
TOTAL		11	8	92	42	304	189	208	676	336	781	1502	451	255	0	0	0	0	143	4998

Untuk grafik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri keadaan tahun 2024 dapat terlihat sebagai berikut :





Berdasarkan Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kelas Jabatan adalah sebagai berikut :

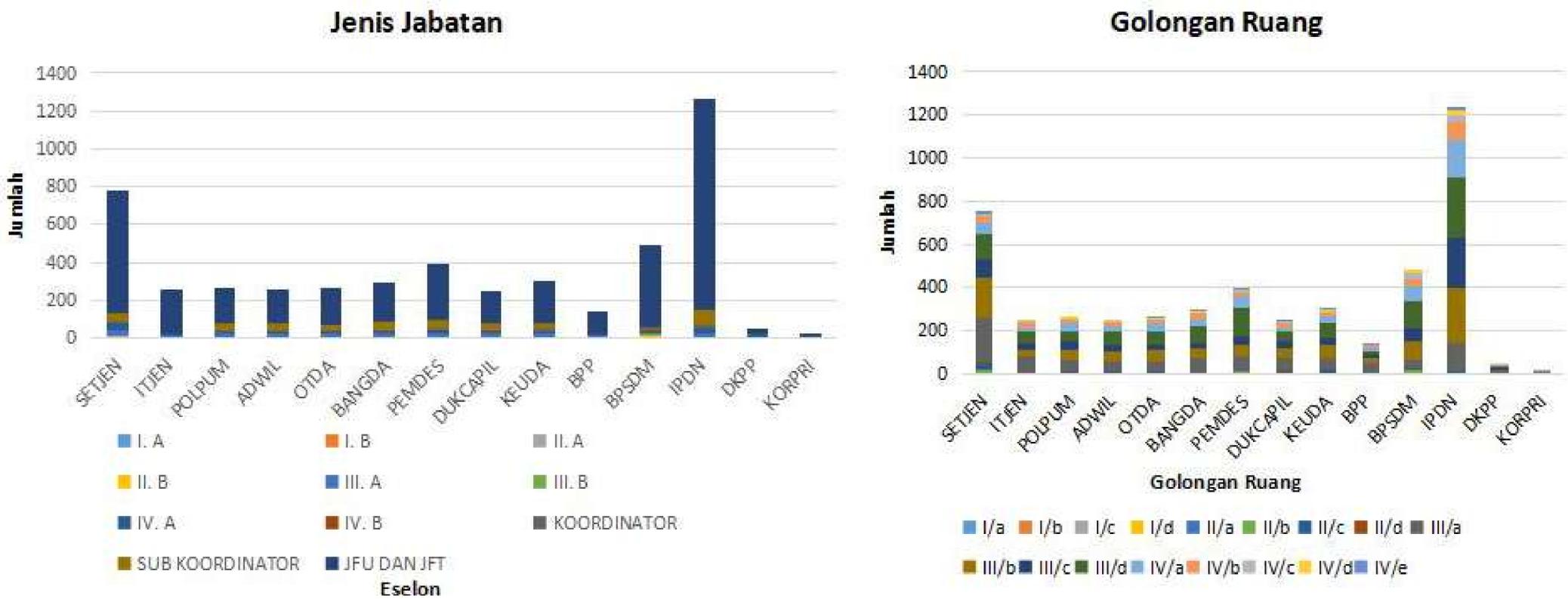
1. Kelas Jabatan 17 tersebar rata pada unit kerja Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan jumlah masing-masing 1 orang.
2. Kelas Jabatan 16 paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 6 orang dan Kelas Jabatan 16 paling sedikit terdapat pada unit kerja Inspektorat Jenderal sejumlah 0 orang.
3. Kelas Jabatan 15 paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 21 orang dan pada unit kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sejumlah 0 orang.
4. Kelas Jabatan 14 paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 70 orang dan Kelas Jabatan 14 paling sedikit terdapat pada unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sejumlah 0 orang.
5. Kelas Jabatan 13 paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 194 orang dan Kelas Jabatan 13 paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sejumlah 0 orang.
6. Kelas Jabatan 12 paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 194 orang dan Kelas Jabatan 12 tidak terdapat pada unit kerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
7. Kelas Jabatan 11 paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 86 orang dan Kelas Jabatan 11 paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan jumlah 0 orang.
8. Kelas Jabatan 10 paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 105 orang dan Kelas Jabatan 10 tidak terdapat pada unit kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Sekretariat Pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri.
9. Kelas Jabatan 9 paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 236 orang dan Kelas Jabatan 9 tidak terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri.
10. Kelas Jabatan 8 paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 276 orang dan Kelas Jabatan 8 paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan jumlah 2 orang.
11. Kelas Jabatan 7 paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 253 orang dan Kelas Jabatan 7 paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri sejumlah 6 orang.
12. Kelas Jabatan 6 paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 111 orang dan Kelas Jabatan 6 tidak terdapat pada unit kerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Sekretariat Pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri.
13. Kelas Jabatan 5 paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 86 orang dan Kelas Jabatan 5 tidak terdapat pada unit kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.



D. Bezetting Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan Golongan

NO.	UNIT KERJA	ESELON											GOLONGAN RUANG																						
		I				II				III			IV		KOORDINATOR	SUB KOORDINATOR	JFU DAN JFT	JML	I				II				III				IV				JML
		A	B	A	B	A	B	A	B	a	b	c	d	a					b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e					
1	SEKRETARIAT JENDERAL :	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
	BIRO PERENCANAAN	0	0	1	0	4	0	1	0	0	10	63	79	0	0	0	0	0	1	7	0	22	12	10	15	2	4	0	1	0	74				
	BIRO KEPEGAWAAN	0	0	1	0	4	0	3	0	0	2	108	118	0	0	0	1	0	1	3	1	28	22	20	22	9	7	2	0	0	116				
	BIRO UMUM	0	0	1	0	3	0	5	0	1	3	96	109	0	0	1	0	2	2	10	2	20	24	10	13	8	4	2	1	1	100				
	BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA	0	0	1	0	2	0	2	0	0	8	49	62	0	0	0	0	0	1	1	0	14	24	6	7	5	3	1	0	0	62				
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	0	0	1	0	4	0	9	0	0	1	105	120	0	0	0	0	0	1	0	1	44	46	17	6	4	0	0	1	0	120				
	BIRO HUKUM	0	0	1	0	2	0	1	0	2	4	36	46	0	0	0	0	0	1	1	0	12	8	5	8	3	3	0	1	0	42				
	PUSAT FASILITASI KERJA SAMA	0	0	1	0	2	0	1	0	1	6	31	42	0	0	0	0	0	1	0	0	12	8	7	6	4	3	1	0	0	42				
	PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI	0	0	1	0	4	0	9	0	0	6	60	72	0	0	0	0	0	1	0	0	14	20	5	12	8	3	1	0	0	64				
	BIDANG HUKUM DAN KESATUAN BANGSA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
	BIDANG KEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
	STAF KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2				
	PUSAT PENERANGAN	0	0	1	0	0	0	1	0	3	6	36	47	0	0	0	0	0	1	2	0	16	11	2	6	6	2	0	1	0	47				
	BIRO KEUANGAN DAN ASET	0	0	1	0	3	0	8	0	1	0	65	78	0	0	0	0	0	3	11	1	19	12	6	16	5	4	0	1	0	78				
2	INSPEKTORAT JENDERAL	1	0	6	0	4	0	9	0	0	0	239	259	0	0	0	0	0	1	4	1	73	34	30	52	18	19	10	12	0	254				
3	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	1	0	6	0	15	0	11	0	8	37	183	261	0	0	0	0	0	1	9	1	51	49	38	51	33	17	3	4	0	257				
4	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1	0	6	0	16	0	9	0	10	33	178	253	0	0	0	0	0	1	8	1	50	43	29	64	24	19	2	4	0	245				
5	DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH	1	0	5	0	16	0	11	0	6	32	190	261	0	0	0	0	0	1	4	1	73	34	30	52	18	19	10	12	0	257				
6	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1	0	6	0	16	0	10	0	10	38	213	294	0	0	0	0	0	1	1	1	72	41	28	77	33	25	5	5	1	290				
7	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	1	0	5	1	19	0	14	0	13	37	302	392	0	0	0	0	1	7	2	3	67	57	38	132	50	22	8	3	1	391				
8	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	1	0	6	0	16	0	8	0	7	37	171	246	0	0	0	0	0	1	12	2	58	44	32	49	18	22	3	4	1	246				
9	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	1	0	6	0	17	0	11	0	11	31	223	300	0	0	0	0	0	5	13	0	54	60	33	67	31	23	5	4	1	296				
10	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	0	5	0	4	0	9	0	0	5	115	139	0	0	0	0	0	0	0	0	53	23	12	19	12	2	4	1	138					
11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	0	4	4	5	4	10	13	13	7	430	491	0	0	0	0	2	15	9	0	41	82	67	117	77	27	30	14	6	487				
12	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	0	0	4	0	17	0	30	0	13	83	1115	1262	0	0	0	0	0	5	3	5	132	253	232	278	171	87	33	21	18	1238				
13	SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	0	0	1	0	6	0	13	0	0	2	23	45	0	0	0	0	0	0	0	0	15	4	4	14	3	4	0	1	0	45				
14	SEKRETARIAT PENGURUS KORPRI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	0	0	0	1	0	3	6	0	0	0	6	16	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	4	3	1	1	0	0	0	16				
15	SEKRETARIAT BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	1	0	3	0	4	0	7	0	2	8	73	98	0	0	0	0	0	6	11	0	14	26	9	16	7	5	1	2	1	98				
16	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA	0	0	3	0	13	0	41	0	1	2	124	184	0	0	2	2	0	1	12	6	62	31	20	29	8	9	2	0	0	184				
17	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN	1	0	3	0	0	0	2	0	6	2	26	40	0	0	0	0	0	0	1	0	12	8	0	7	4	5	1	0	0	38				
18	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN	2	0	3	0	1	0	1	0	0	6	26	39	0	0	0	0	0	2	1	0	6	11	0	7	5	3	1	1	0	37				
	TOTAL	14	6	82	6	197	7	234	13	108	406	4286	5359	0	0	3	3	5	64	124	27	1014	1006	686	1158	585	352	115	88	36	5266				

Untuk grafik Bezetting Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan dan Golongan Ruang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri keadaan tahun 2024 dapat terlihat sebagai berikut :





Berdasarkan Grafik Jumlah Bezetting Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan adalah sebagai berikut :

1. Eselon I/a tersebar rata pada unit kerja dengan jumlah masing-masing 1 orang, kecuali Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri tidak ada.
2. Eselon I/b hanya terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 6 orang.
3. Eselon II/a paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 10 orang dan tidak terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri.
4. Eselon II/b paling banyak terdapat pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sejumlah 4 orang dan pada unit kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, dan Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri dengan jumlah masing-masing 0 orang.
5. Eselon III/a paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 28 orang dan tidak terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri.
6. Eselon III/b hanya terdapat pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 orang, dan Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri dengan jumlah masing-masing 3 orang.
7. Eselon IV/a paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal dengan jumlah 32 orang dan paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri dengan jumlah 6 orang.
8. Eselon IV/b hanya terdapat pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sejumlah 13 orang.
9. Koordinator paling banyak terdapat pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sejumlah 14 orang dan tidak terdapat pada unit kerja Inspektorat Jenderal, Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri.

10. Sub Koordinator paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 83 orang dan tidak terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri.

11. Fungsional dan Pelaksana paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan jumlah 1115 orang dan Fungsional dan Pelaksana paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri sejumlah 6 orang.

Berdasarkan Grafik Jumlah Bezetting Pegawai berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut :

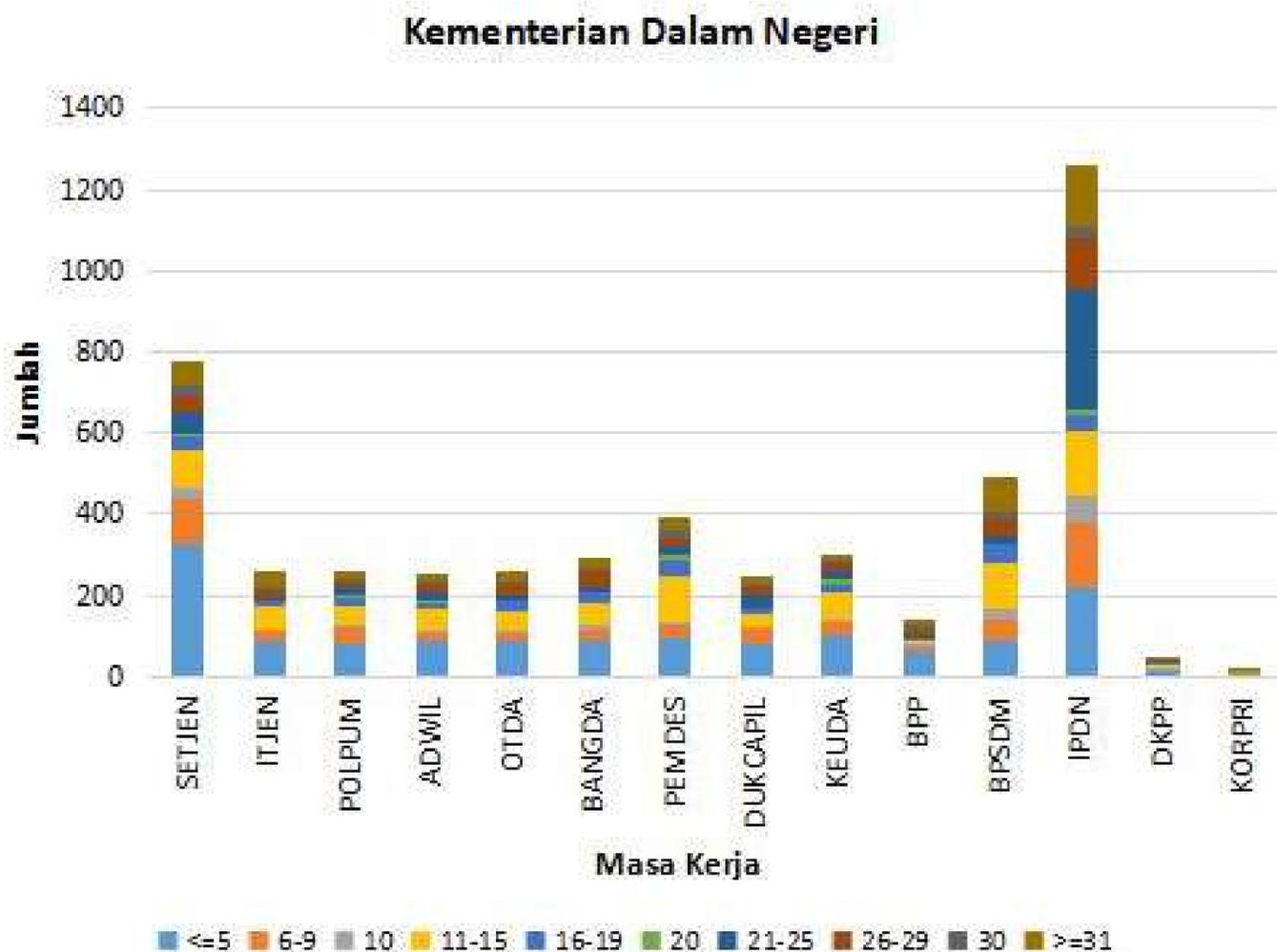
1. Golongan Ruang I/c dan I/d hanya 3 orang.
2. Golongan Ruang II/a 5 orang, Golongan Ruang II/b 64 orang, Golongan Ruang II/c 124 orang, dan Golongan Ruang II/d 27 orang.
3. Golongan Ruang III/a 1014 orang, Golongan Ruang III/b 1006 orang, Golongan Ruang III/c 686 orang, dan Golongan Ruang III/d 1158 orang.
4. Golongan Ruang IV/a 585 orang, Golongan Ruang IV/b 352 orang, Golongan Ruang IV/c 115 orang, Golongan Ruang IV/d 88 orang, dan Golongan Ruang IV/e 36 orang.



E. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Masa Kerja Keseluruhan

NO.	UNIT KERJA	MASA KERJA KESELURUHAN DALAM TAHUN										JUMLAH
		<=5	6-9	10	11-15	16-19	20	21-25	26-29	30	>=31	
1	SETJEN	327	112	27	91	33	10	49	42	29	59	779
2	ITJEN	88	24	2	59	16	1	4	21	7	37	259
3	POLPUM	80	41	7	49	20	4	19	15	7	19	261
4	ADWIL	86	21	10	48	19	6	17	22	8	16	253
5	OTDA	86	21	7	46	25	6	9	25	10	26	261
6	BANGDA	91	25	13	51	27	3	14	34	10	26	294
7	PEMDES	97	30	11	107	44	9	20	20	19	35	392
8	DUKCAPIL	83	36	4	29	14	5	31	20	6	18	246
9	KEUDA	102	32	10	62	21	17	16	22	6	12	300
10	BPP	65	9	6	12	2	3	8	10	13	11	139
11	BPSDM	86	53	28	111	47	4	21	35	19	87	491
12	IPDN	218	164	63	159	42	13	296	125	26	156	1262
13	DKPP	17	2	1	9	5	1	4	2	0	4	45
14	KORPRI	4	5	1	2	0	1	1	1	0	1	16
TOTAL		1430	575	190	835	315	83	509	394	160	507	4998

Untuk grafik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Masa Kerja Keseluruhan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri keadaan bulan Oktober 2024 dapat terlihat sebagai berikut :





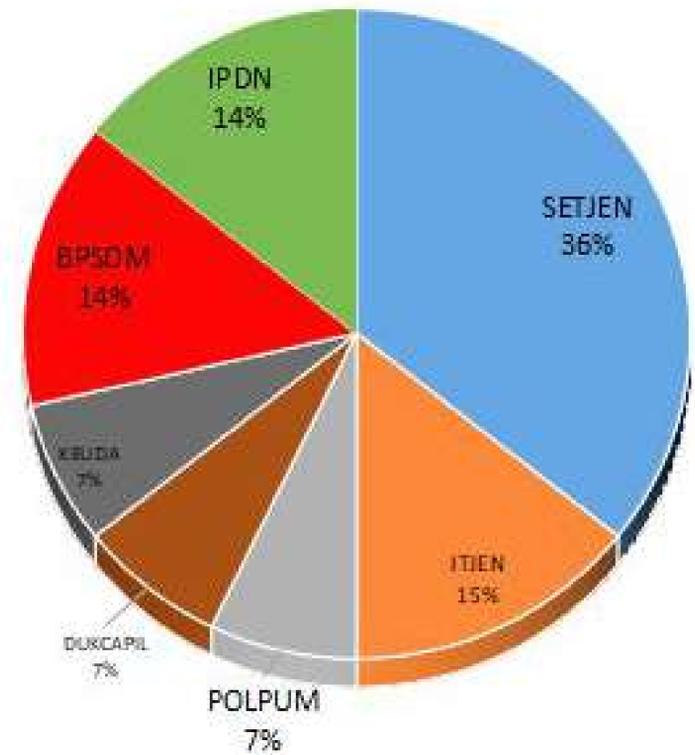
Berdasarkan Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Masa Kerja Keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Masa Kerja ≤ 5 tahun paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 327 orang dan Masa Kerja ≤ 5 tahun paling sedikit terdapat pada unit kerja KORPRI Kementerian Dalam Negeri sejumlah 4 orang.
2. Masa Kerja 6-9 tahun paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 164 orang dan Masa Kerja 6-9 tahun paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sejumlah 2 orang.
3. Masa Kerja 10 tahun paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 159 orang dan Masa Kerja 10 tahun paling sedikit terdapat pada unit kerja KORPRI Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, masing-masing sejumlah 1 orang.
4. Masa Kerja 11-15 tahun paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 159 orang dan Masa Kerja 11-15 tahun paling sedikit terdapat pada unit kerja KORPRI Kementerian Dalam Negeri sejumlah 0 orang.
5. Masa Kerja 16-19 tahun paling banyak terdapat pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sejumlah 47 orang dan Masa Kerja 16-19 tahun paling sedikit terdapat pada unit kerja KORPRI Kementerian Dalam Negeri sejumlah 0 orang.
6. Masa Kerja 20 tahun paling banyak terdapat pada unit kerja Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sejumlah 17 orang dan Masa Kerja 20 tahun paling sedikit terdapat pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan KORPRI Kementerian Dalam Negeri masing-masing 1 orang.
7. Masa Kerja 21-25 tahun paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 296 orang dan Masa Kerja 21-25 tahun paling sedikit terdapat pada unit kerja KORPRI Kementerian Dalam Negeri sejumlah 1 orang.
8. Masa Kerja 26-29 tahun paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 125 orang dan Masa Kerja 26-29 tahun paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri sejumlah 1 orang.
9. Masa Kerja 30 tahun paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 29 orang dan Masa Kerja 30 tahun paling sedikit terdapat pada unit kerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri masing-masing sejumlah 0 orang.
10. Masa Kerja ≥ 31 tahun paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 156 orang dan Masa Kerja ≥ 31 tahun paling sedikit terdapat pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri sejumlah 1 orang.

B. Pegawai Meninggal

NO.	UNIT KERJA	TOTAL
1	2	3
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0
	BIRO PERENCANAAN	0
	BIRO KEPEGAWAIAN	1
	BIRO UMUM	0
	BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA	1
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	0
	BIRO HUKUM	1
	PUSAT FASILITASI KERJA SAMA	0
	PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI	0
	BIDANG HUKUM DAN KESATUAN BANGSA	0
	BIDANG PEMERINTAHAN	0
	BIDANG KEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	0
	BIDANG APARATUR DAN PELAYANAN PUBLIK	0
	BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	1
	STAF KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI	0
	PUSAT PENERANGAN	0
	BIRO KEUANGAN DAN ASET	1
2	INSPEKTORAT JENDERAL	2
3	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	1
4	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	0
5	DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH	0
6	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH	0
7	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	0
8	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1
9	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	1
10	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	0
11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2
12	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	2
13	SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	0
14	SEKRETARIAT PENGURUS KORPRI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	0
	TOTAL	14

Jumlah Meninggal



Berdasarkan Grafik Jumlah Pegawai Meninggal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

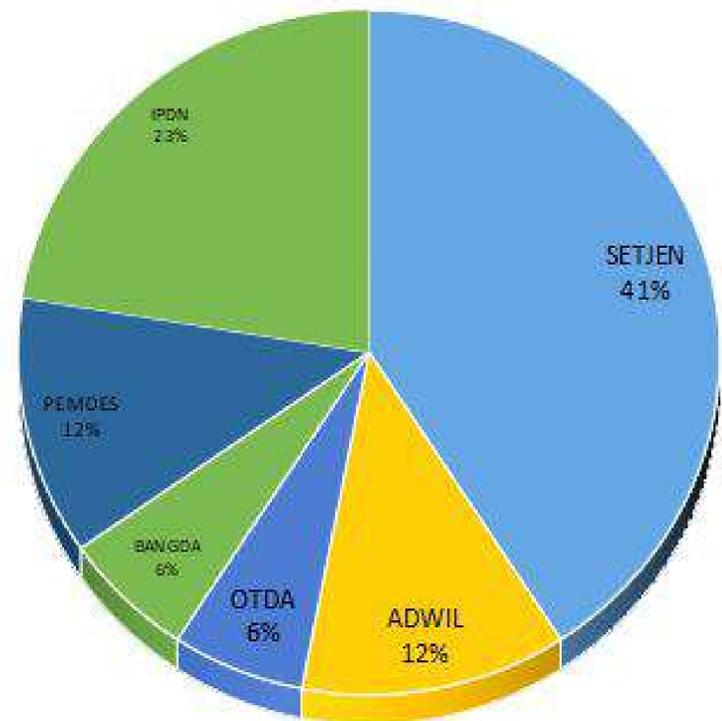
1. Pada unit kerja Sekretariat Jenderal jumlah pegawai meninggal adalah sejumlah 5 orang.
2. Pada unit kerja Inspektorat Jenderal jumlah pegawai meninggal adalah sejumlah 2 orang.
3. Pada unit kerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum jumlah pegawai meninggal adalah sejumlah 1 orang.
4. Pada unit kerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan jumlah pegawai meninggal adalah sejumlah 0 orang.
5. Pada unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah jumlah pegawai meninggal adalah sejumlah 0 orang.
6. Pada unit kerja Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah jumlah pegawai meninggal adalah sejumlah 0 orang.
7. Pada unit kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa jumlah pegawai meninggal adalah sejumlah 0 orang.

8. Pada unit kerja Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah pegawai meninggal adalah sejumlah 1 orang.
9. Pada unit kerja Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah jumlah pegawai meninggal adalah sejumlah 1 orang.
10. Pada unit kerja Badan Strategi Kebijakan dalam Negeri jumlah pegawai meninggal adalah sejumlah 0 orang.
11. Pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia jumlah pegawai meninggal adalah sejumlah 2 orang.
12. Pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri jumlah pegawai meninggal adalah sejumlah 2 orang.
13. Pada unit kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jumlah pegawai meninggal adalah sejumlah 0 orang.
14. Pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri jumlah pegawai meninggal adalah sejumlah 0 orang.

C. Pegawai Pindah Wilayah Kerja

NO.	UNIT KERJA	TOTAL
1	2	3
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0
	BIRO PERENCANAAN	2
	BIRO KEPEGAWAIAN	2
	BIRO UMUM	3
	BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA	0
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	5
	BIRO HUKUM	0
	PUSAT FASILITASI KERJA SAMA	1
	PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI	3
	BIDANG HUKUM DAN KESATUAN BANGSA	0
	BIDANG PEMERINTAHAN	0
	BIDANG KEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	0
	BIDANG APARATUR DAN PELAYANAN PUBLIK	0
	BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	0
	STAF KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI	0
	PUSAT PENERANGAN	2
	BIRO KEUANGAN DAN ASET	2
2	INSPEKTORAT JENDERAL	1
3	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	1
4	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	6
5	DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH	3
6	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH	3
7	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	6
8	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2
9	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	1
10	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	1
11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2
12	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	11
13	SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	0
14	SEKRETARIAT PENGURUS KORPRI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	0
	TOTAL	57

Jumlah Pindah Wilayah Kerja

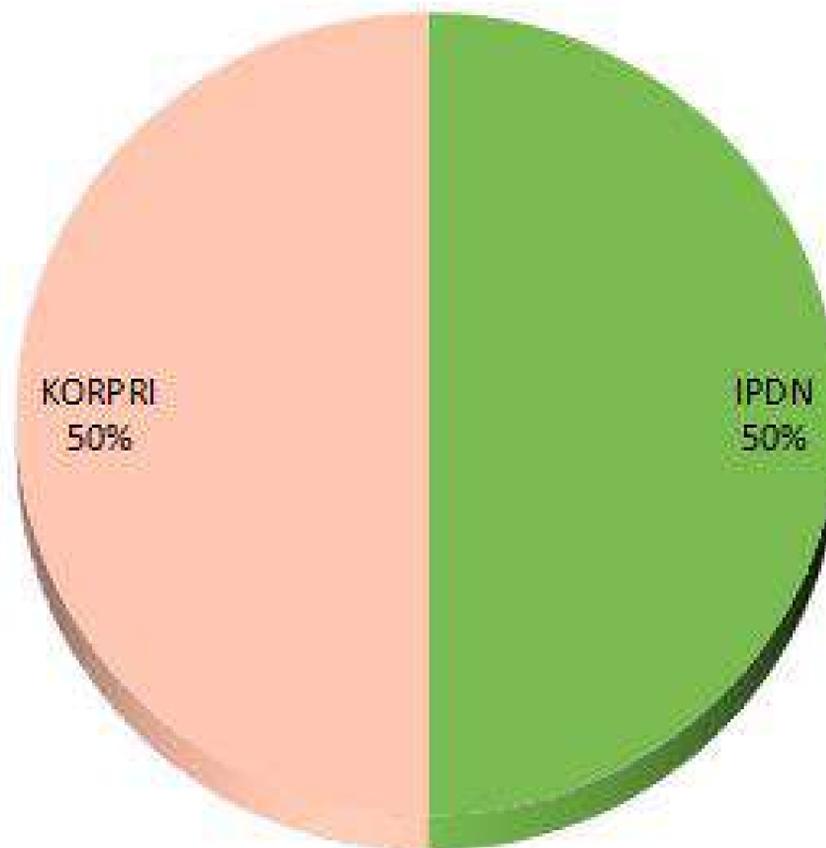


Berdasarkan Grafik Jumlah Pegawai Pindah Wilayah Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

1. Pada unit kerja Sekretariat Jenderal jumlah pegawai pindah wilayah kerja adalah sejumlah 20 orang.
2. Pada unit kerja Inspektorat Jenderal jumlah pegawai pindah wilayah kerja adalah sejumlah 1 orang.
3. Pada unit kerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum jumlah pegawai pindah wilayah kerja adalah sejumlah 1 orang.
4. Pada unit kerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan jumlah pegawai pindah wilayah kerja adalah sejumlah 6 orang.
5. Pada unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah jumlah pegawai pindah wilayah kerja adalah sejumlah 3 orang.
6. Pada unit kerja Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah jumlah pegawai pindah wilayah kerja adalah sejumlah 3 orang.
7. Pada unit kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa jumlah pegawai pindah wilayah kerja adalah sejumlah 6 orang.
8. Pada unit kerja Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah pegawai pindah wilayah kerja adalah sejumlah 2 orang.
9. Pada unit kerja Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah jumlah pegawai pindah wilayah kerja adalah sejumlah 1 orang.
10. Pada unit kerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri jumlah pegawai pindah wilayah kerja adalah sejumlah 1 orang.
11. Pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia jumlah pegawai pindah wilayah kerja adalah sejumlah 2 orang.
12. Pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri jumlah pegawai pindah wilayah kerja adalah sejumlah 11 orang.
13. Pada unit kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jumlah pegawai pindah wilayah kerja adalah sejumlah 0 orang.
14. Pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri jumlah pegawai pindah wilayah kerja adalah sejumlah 0 orang.

D. Pegawai Berhenti

Jumlah Berhenti



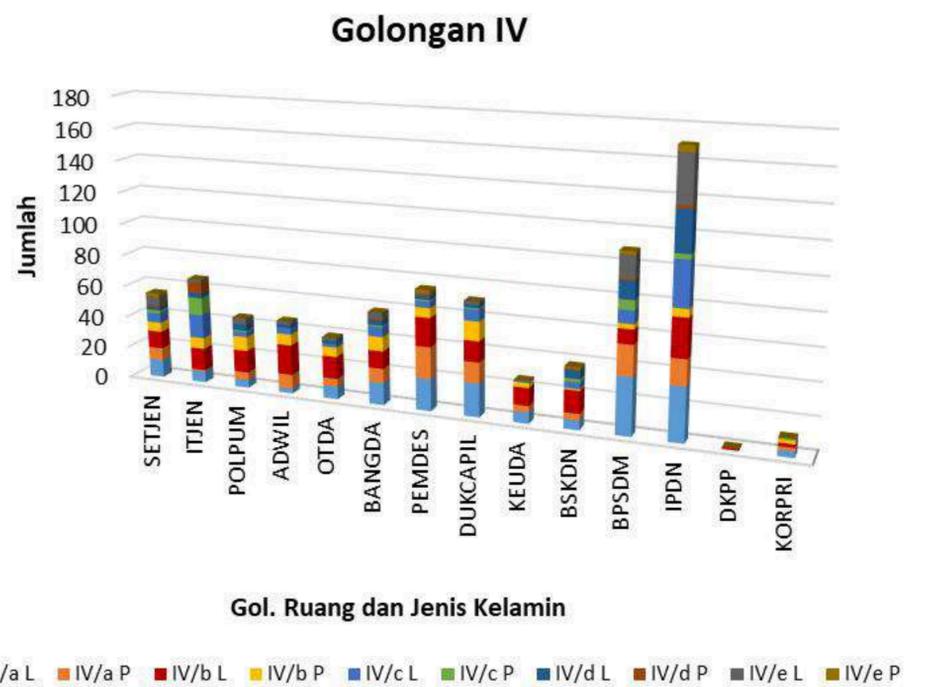
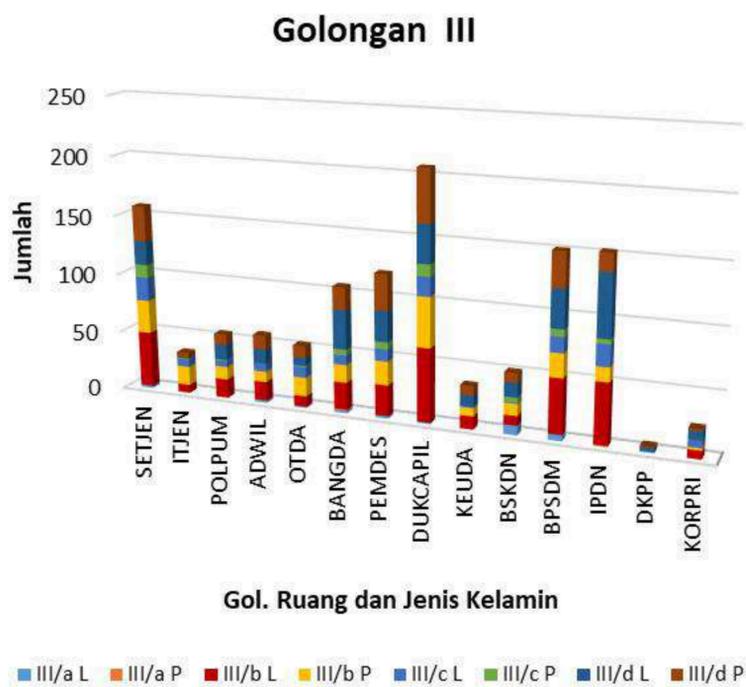
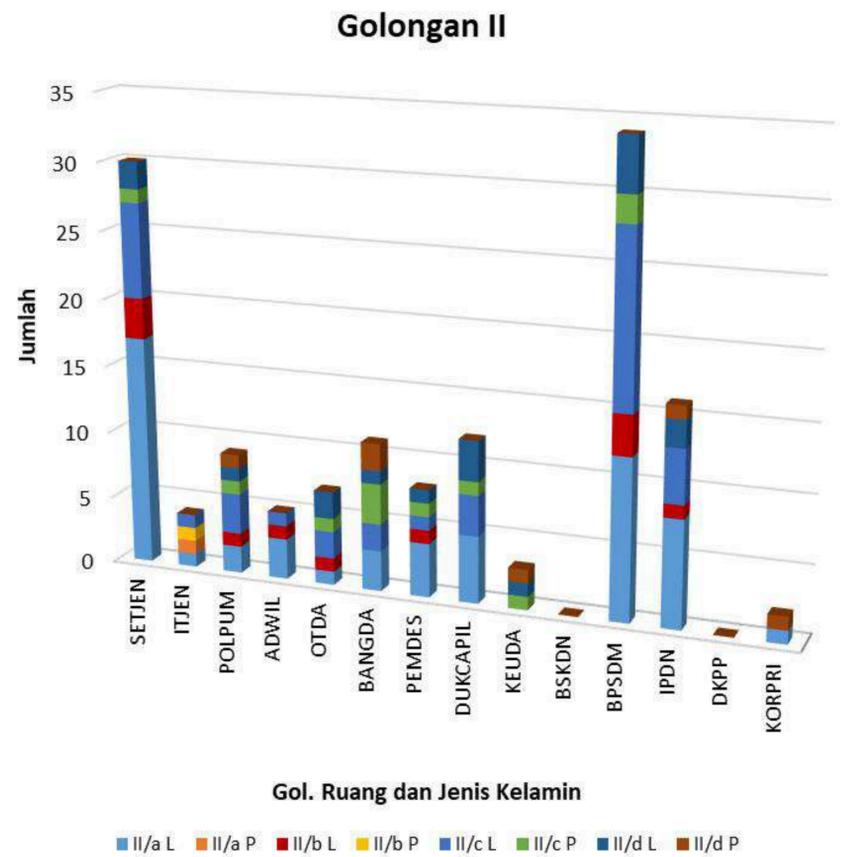
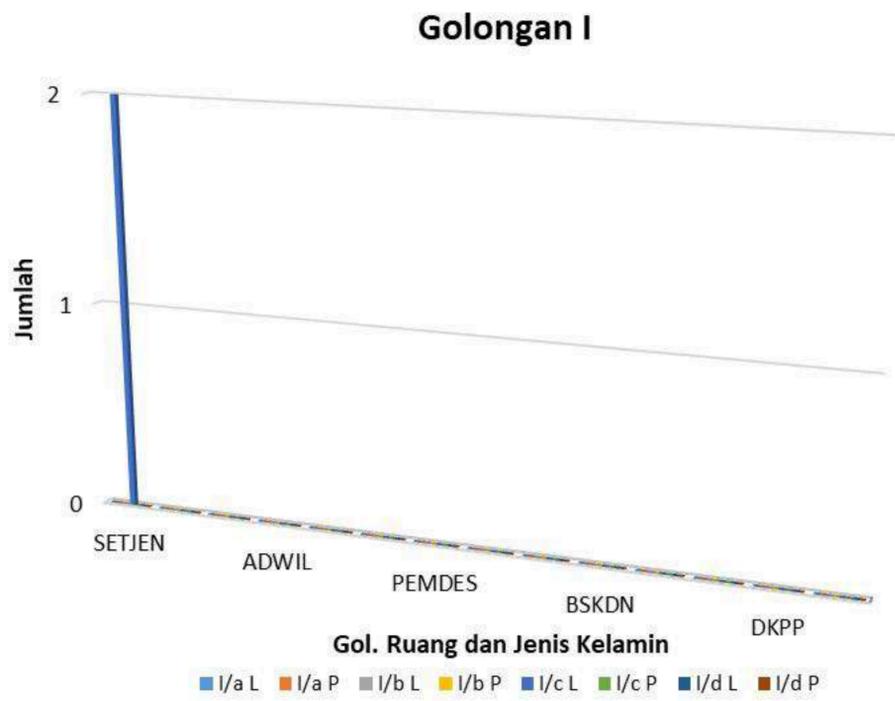
NO.	UNIT KERJA	TOTAL
1	2	3
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0
	BIRO PERENCANAAN	0
	BIRO KEPEGAWAIAN	0
	BIRO UMUM	0
	BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA	0
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	0
	BIRO HUKUM	0
	PUSAT FASILITASI KERJA SAMA	0
	PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI	0
	BIDANG HUKUM DAN KESATUAN BANGSA	0
	BIDANG PEMERINTAHAN	0
	BIDANG KEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	0
	BIDANG APARATUR DAN PELAYANAN PUBLIK	0
	BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	0
	STAF KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI	0
	PUSAT PENERANGAN	0
	BIRO KEUANGAN DAN ASET	0
2	INSPEKTORAT JENDERAL	0
3	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	0
4	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	0
5	DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH	0
6	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH	0
7	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	0
8	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0
9	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	0
10	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	0
11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0
12	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	1
13	SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	0
14	SEKRETARIAT PENGURUS KORPRI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	1
	TOTAL	2

Berdasarkan Grafik Jumlah Pegawai Berhenti di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

1. Pada unit kerja Sekretariat Pengurus KORPRI Kementerian Dalam Negeri jumlah pegawai berhenti 1 orang.
 2. Pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri jumlah pegawai berhenti 1 orang.
- selain dari Unit Kerja tersebut, tidak terdapat Pegawai yang berhenti

E. Pegawai Pensiun Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Untuk grafik Pegawai Pensiun berdasarkan golongan dan jenis kelamin di lingkungan Kementerian Dalam Negeri keadaan bulan Oktober 2024 dapat terlihat sebagai berikut :



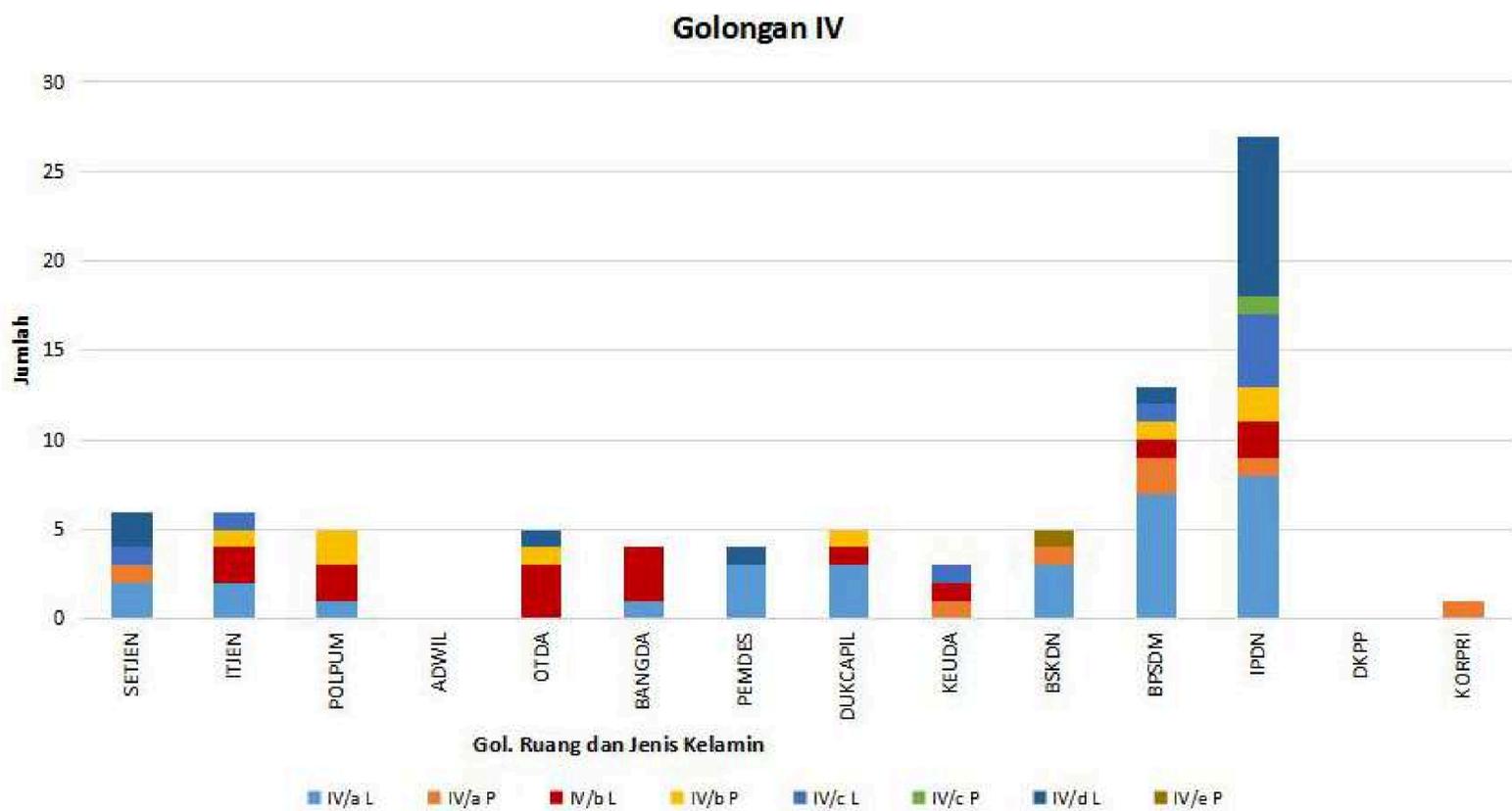
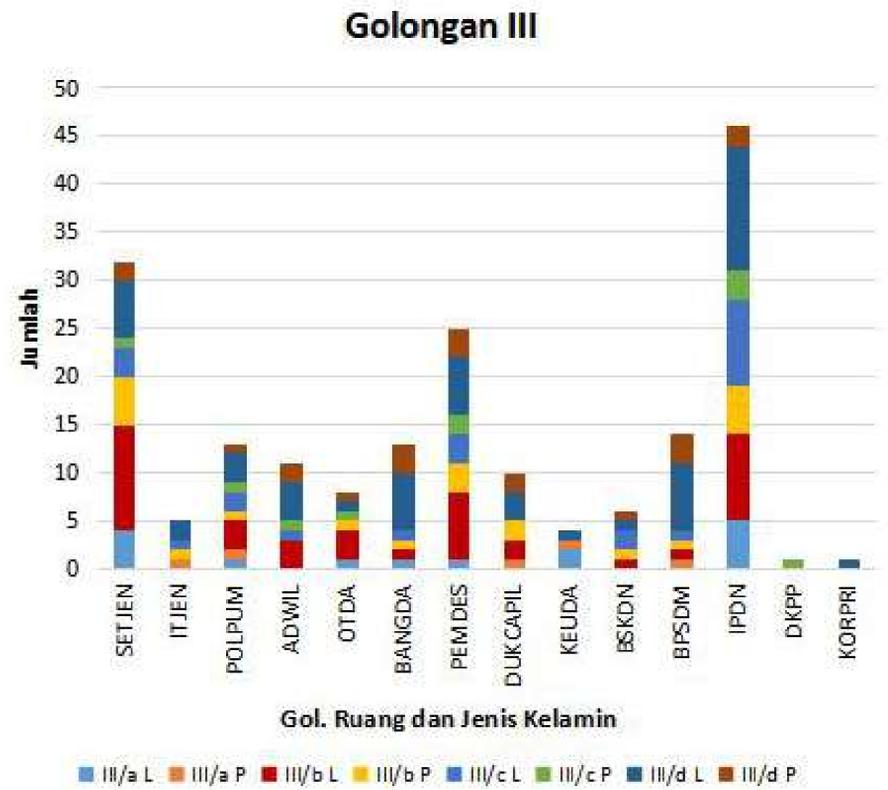
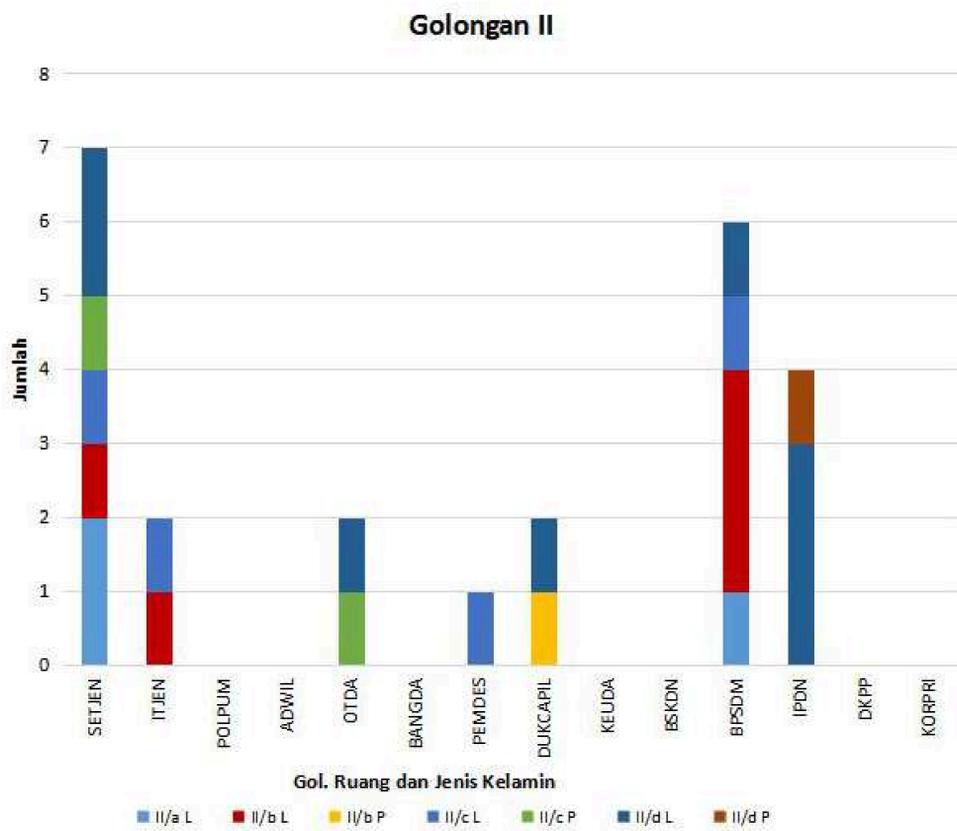


Berdasarkan Grafik Jumlah Pegawai Pensiun berdasarkan Golongan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai pensiun laki-laki golongan ruang I/a hanya terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 0 orang.
2. Jumlah pegawai pensiun laki-laki golongan ruang II/a 2 orang. Sedangkan jumlah pegawai pensiun perempuan golongan ruang II/a hanya terdapat pada unit kerja Inspektorat Jenderal sejumlah 1 orang.
3. Jumlah pegawai pensiun laki-laki golongan ruang II/b 11 orang. Sedangkan jumlah pegawai pensiun perempuan golongan ruang II/b hanya terdapat pada unit kerja Inspektorat Jenderal sejumlah 1 orang.
4. Jumlah pegawai pensiun laki-laki golongan ruang II/c 37 orang. Sedangkan jumlah pegawai pensiun perempuan golongan ruang II/c 11 orang.
5. Jumlah pegawai pensiun laki-laki golongan ruang II/d 17 orang. Sedangkan jumlah pegawai pensiun perempuan golongan ruang II/d 6 orang.
6. Jumlah pegawai pensiun laki-laki golongan ruang III/a 29 orang. Sedangkan jumlah pegawai pensiun perempuan golongan ruang III/a 2 orang.
7. Jumlah pegawai pensiun laki-laki golongan ruang III/b 329 orang. Sedangkan jumlah pegawai pensiun perempuan golongan ruang III/b 208 orang.
8. Jumlah pegawai pensiun laki-laki golongan ruang III/c 120 orang. Sedangkan jumlah pegawai pensiun perempuan golongan ruang III/c 49 orang.
9. Jumlah pegawai pensiun laki-laki golongan ruang III/d 259 orang. Sedangkan jumlah pegawai pensiun perempuan golongan ruang III/d 221 orang.
10. Jumlah pegawai pensiun laki-laki golongan ruang IV/a 176 orang. Sedangkan jumlah pegawai pensiun perempuan golongan ruang IV/a 115 orang.
11. Jumlah pegawai pensiun laki-laki golongan ruang IV/b 175 orang. Sedangkan jumlah pegawai pensiun perempuan golongan ruang IV/b 76 orang.
12. Jumlah pegawai pensiun laki-laki golongan ruang IV/c 88 orang. Sedangkan jumlah pegawai pensiun perempuan golongan ruang IV/c 29 orang.
13. Jumlah pegawai pensiun laki-laki golongan ruang IV/d 61 orang. Sedangkan jumlah pegawai pensiun perempuan golongan ruang IV/d 14 orang.
14. Jumlah pegawai pensiun laki-laki golongan ruang IV/e 66 orang. Sedangkan jumlah pegawai pensiun perempuan golongan ruang IV/e 11 orang.

F. Pegawai Meninggal Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Untuk grafik Pegawai Meninggal berdasarkan golongan dan jenis kelamin di lingkungan Kementerian Dalam Negeri keadaan bulan Oktober 2024 dapat terlihat sebagai berikut :





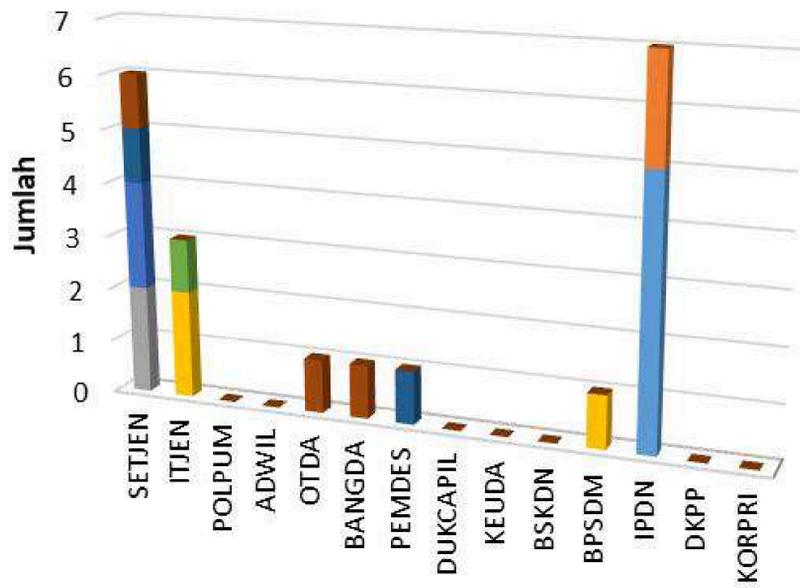
Berdasarkan Grafik Jumlah Pegawai Meninggal berdasarkan Golongan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai meninggal laki-laki golongan ruang II/a terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 2 orang, dan pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 orang. Sedangkan pegawai meninggal perempuan terdapat pada unit kerja Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan sejumlah 1 orang.
2. Jumlah pegawai meninggal laki-laki golongan ruang II/b terdapat pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sejumlah 3 orang dan 1 orang pada unit kerja Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal. Sedangkan jumlah pegawai meninggal perempuan golongan ruang II/b hanya terdapat pada unit kerja Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sejumlah 1 orang.
3. Jumlah pegawai meninggal laki-laki golongan ruang II/c terdapat 4 orang dan jumlah pegawai meninggal perempuan golongan ruang II/d terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah masing-masing 1 orang.
4. Jumlah pegawai meninggal laki-laki golongan ruang II/d terdapat 8 orang dan jumlah pegawai meninggal perempuan golongan ruang II/d hanya terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 1 orang.
5. Jumlah pegawai meninggal laki-laki golongan ruang III/a berjumlah 15 orang, paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 5 orang, Sedangkan jumlah pegawai meninggal perempuan golongan ruang III/a berjumlah 5 orang.
6. Jumlah pegawai meninggal laki-laki golongan ruang III/b berjumlah 41 orang, paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri berjumlah 9 orang. Sedangkan jumlah pegawai meninggal perempuan golongan ruang III/b berjumlah 21 orang.
7. Jumlah pegawai meninggal laki-laki golongan ruang III/c berjumlah 23 orang, paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri 9 orang. Sedangkan jumlah pegawai meninggal perempuan golongan ruang III/c berjumlah 10 orang.
8. Jumlah pegawai meninggal laki-laki golongan ruang III/d berjumlah 54 orang, paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri 13 orang. Sedangkan jumlah pegawai meninggal perempuan golongan ruang III/d berjumlah 20 orang.
9. Jumlah pegawai meninggal laki-laki golongan ruang IV/a berjumlah 30 orang, paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri berjumlah 8 orang. Sedangkan jumlah pegawai meninggal perempuan golongan ruang IV/a berjumlah 2 orang.
10. Jumlah pegawai meninggal laki-laki golongan ruang IV/a berjumlah 15 orang, paling banyak terdapat pada unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, masing-masing 3 orang. Sedangkan jumlah pegawai meninggal perempuan golongan ruang IV/a berjumlah 8 orang.
11. Jumlah pegawai meninggal laki-laki golongan ruang IV/c berjumlah 8 orang, Sedangkan pegawai meninggal perempuan hanya terdapat 1 orang pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
12. Jumlah pegawai meninggal laki-laki golongan ruang IV/d berjumlah 14 orang, paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri 9 orang. Sedangkan tidak terdapat pegawai meninggal pada perempuan.
13. Jumlah pegawai meninggal tidak terdapat pada laki-laki golongan ruang IV/e, Sedangkan pada perempuan hanya terdapat pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berjumlah 1 orang.

G. Pegawai Pindah Wilayah Kerja Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

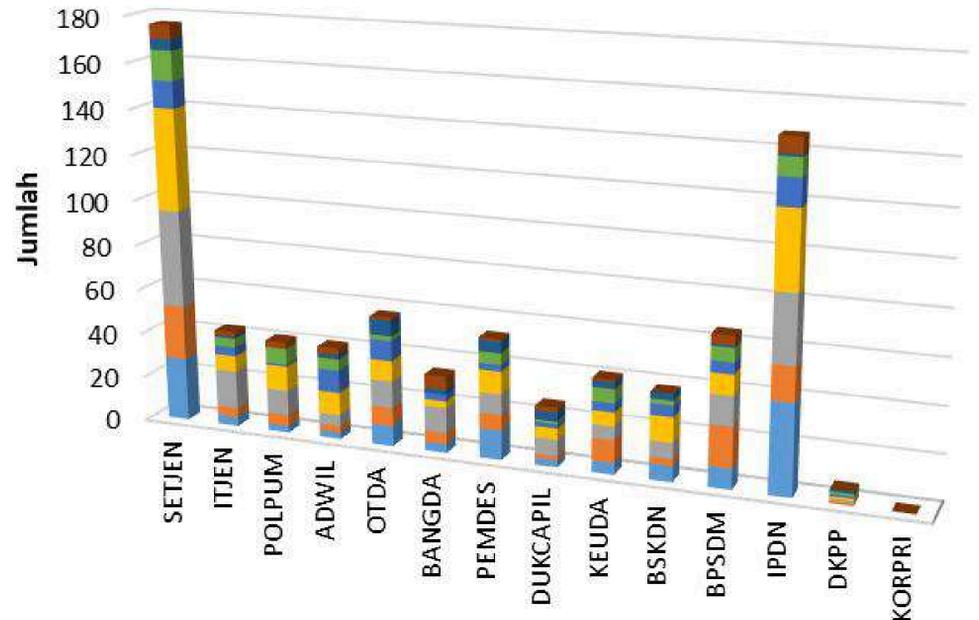
Untuk grafik Pegawai pindah Wilayah Kerja berdasarkan golongan dan jenis kelamin di lingkungan Kementerian Dalam Negeri keadaan bulan Oktober 2024 dapat terlihat sebagai berikut :

Golongan II



Gol. Ruang dan Jenis Kelamin

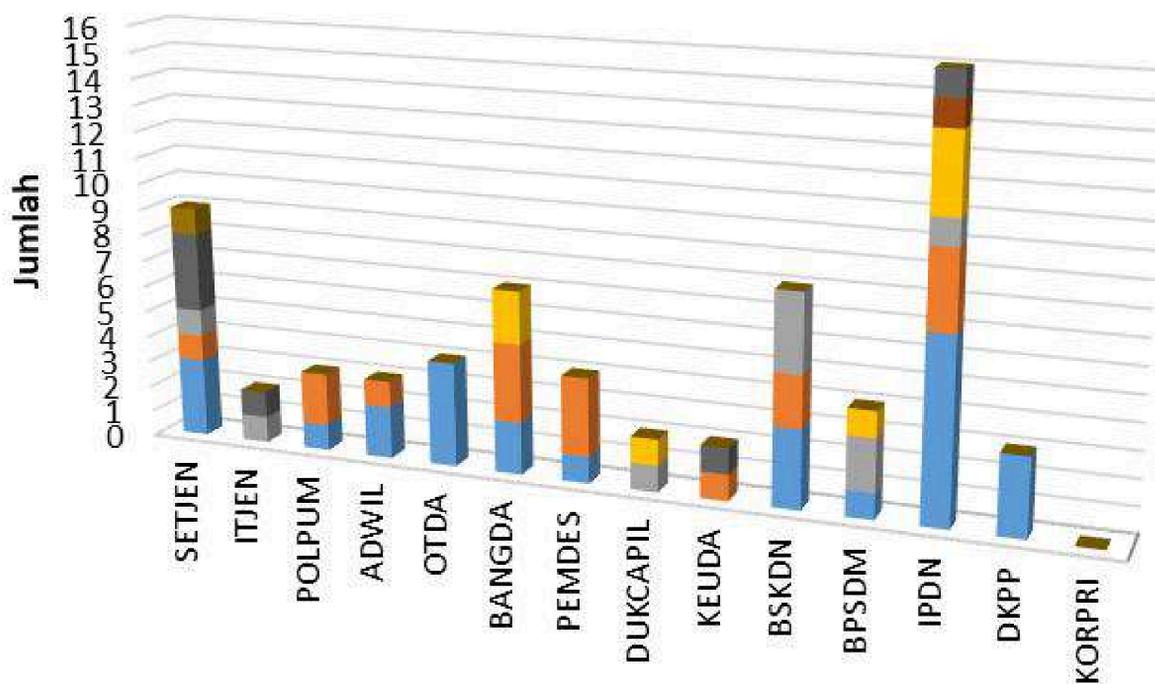
Golongan III



Gol. Ruang dan Jenis Kelamin

■ II/a L ■ II/a P ■ II/b L ■ II/b P ■ II/c L ■ II/c P ■ II/d L ■ II/d P ■ III/a L ■ III/a P ■ III/b L ■ III/b P ■ III/c L ■ III/c P ■ III/d L ■ III/d P

Golongan IV



Gol. Ruang dan Jenis Kelamin

■ IV/a L ■ IV/a P ■ IV/b L ■ IV/b P ■ IV/d P ■ IV/e L ■ IV/e P



Berdasarkan Grafik Jumlah Pegawai pindah wilayah berdasarkan Golongan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

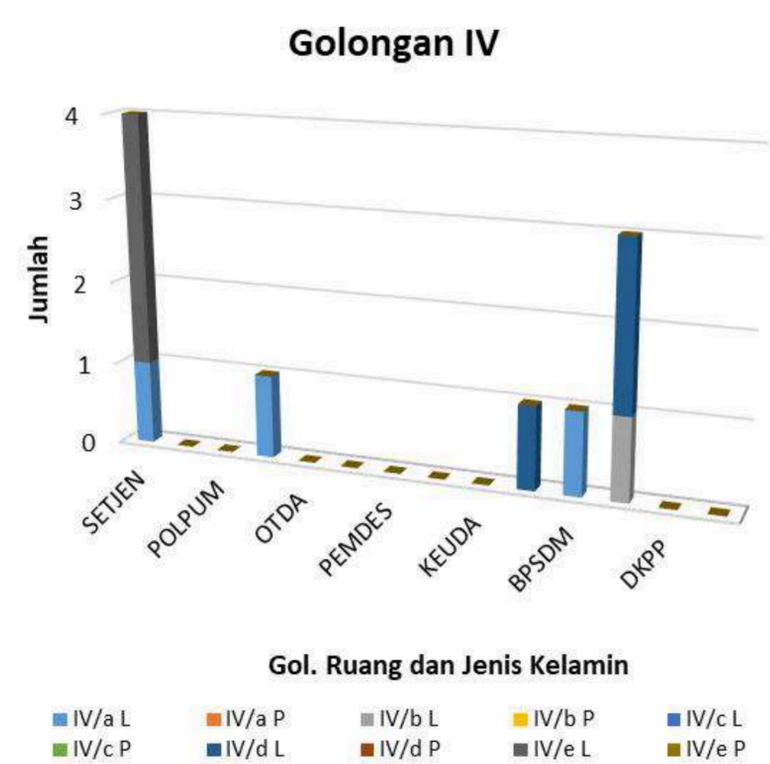
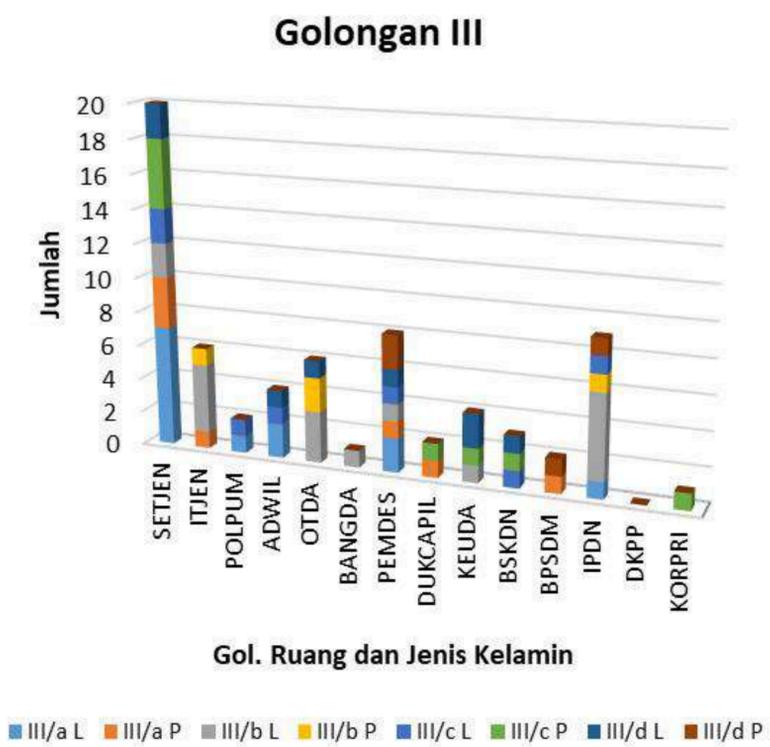
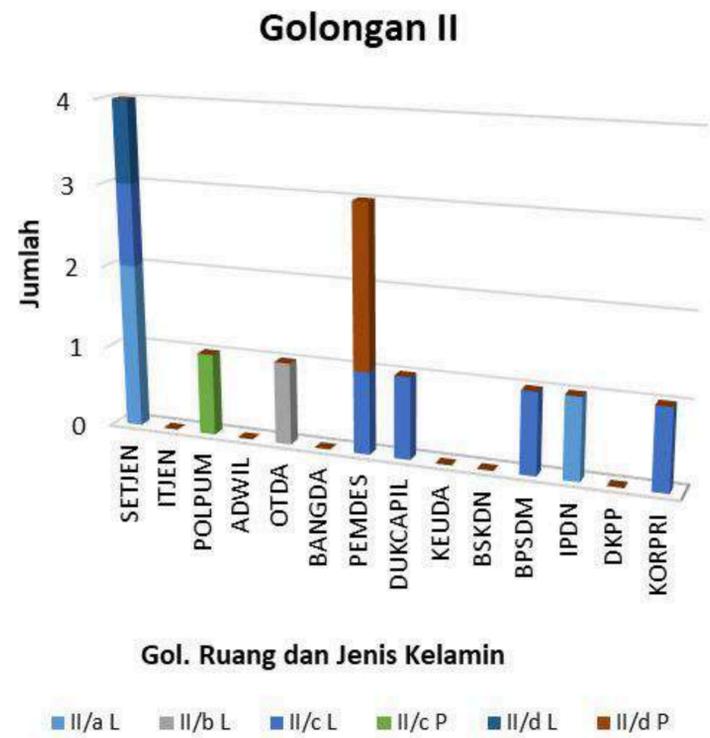
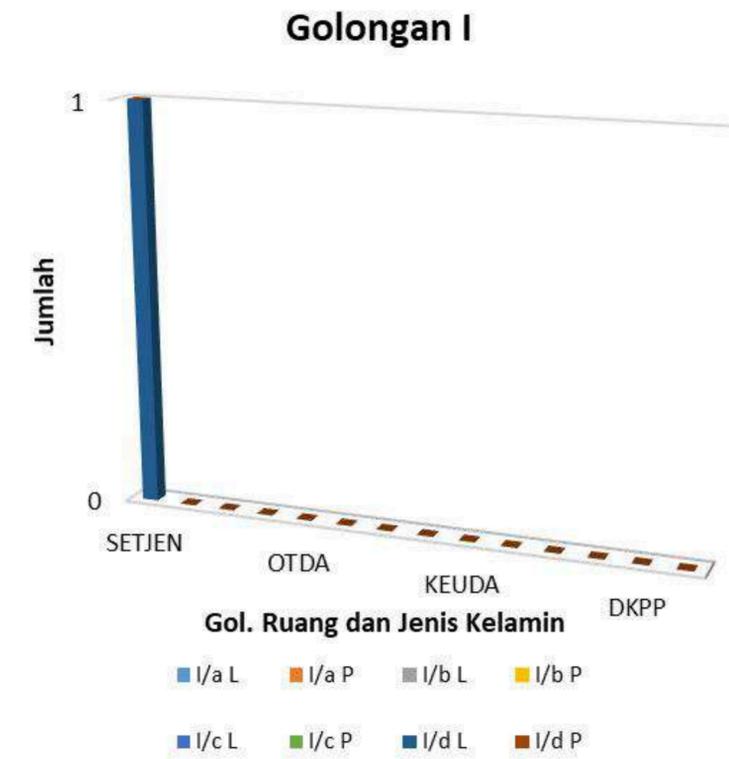
1. Jumlah pegawai pindah wilayah kerja laki-laki golongan ruang II/a hanya terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 5 orang. Sedangkan jumlah pegawai pindah wilayah kerja perempuan golongan ruang II/a hanya terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 2 orang.
2. Jumlah pegawai pindah wilayah kerja laki-laki golongan ruang II/b hanya terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 2 orang. Sedangkan jumlah pegawai pindah wilayah kerja perempuan golongan ruang II/b terdapat pada unit kerja Inspektorat Jenderal sejumlah 2 orang.
3. Jumlah pegawai pindah wilayah kerja laki-laki golongan ruang II/c hanya terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 2 orang. Sedangkan jumlah pegawai pindah wilayah kerja perempuan golongan ruang II/c hanya terdapat pada unit kerja Inspektorat Jenderal sejumlah 1 orang.
4. Jumlah pegawai pindah wilayah kerja laki-laki golongan ruang II/d terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan jumlah masing-masing 1 orang. Sedangkan jumlah pegawai pindah wilayah kerja perempuan golongan ruang II/c tersebar rata pada unit kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Inspektorat Jenderal dengan jumlah masing-masing 1 orang.
5. Jumlah pegawai pindah wilayah kerja laki-laki golongan ruang III/a berjumlah 128 orang, paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 40 orang. Sedangkan jumlah pegawai pindah wilayah kerja perempuan golongan ruang III/a berjumlah 105 orang, paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 15 orang.
6. Jumlah pegawai pindah wilayah kerja laki-laki golongan ruang III/b paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 30 orang. Sedangkan jumlah pegawai pindah wilayah kerja perempuan golongan ruang III/b paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 40 orang.
7. Jumlah pegawai pindah wilayah kerja laki-laki golongan ruang III/c paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 12 orang. Sedangkan jumlah pegawai pindah wilayah kerja perempuan golongan ruang III/c paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 8 orang.



8. Jumlah pegawai pindah wilayah kerja laki-laki golongan ruang III/d paling banyak terdapat pada unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebanyak 7 orang. dan jumlah pegawai pindah wilayah kerja perempuan golongan ruang III/d paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 7 orang.
9. Jumlah pegawai pindah wilayah kerja laki-laki golongan ruang IV/a sebanyak 27 orang, paling banyak pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri 7 orang, dan jumlah pegawai pindah wilayah kerja perempuan golongan ruang IV/a 16 orang.
10. Jumlah pegawai pindah wilayah kerja laki-laki golongan ruang IV/b sebanyak 9 orang paling banyak terdapat pada unit kerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sejumlah 3 orang, dan jumlah pegawai pindah wilayah kerja perempuan golongan ruang IV/b 7 orang.
11. Jumlah pegawai pindah wilayah kerja laki-laki golongan ruang IV/c terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan jumlah masing-masing 1 orang. Sedangkan jumlah pegawai pindah wilayah perempuan golongan ruang IV/c tidak ada.
12. Jumlah pegawai meninggal laki-laki golongan ruang IV/d paling banyak terdapat pada unit kerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sejumlah 3 orang. Sedangkan jumlah pegawai pindah wilayah perempuan golongan ruang IV/d tidak ada.
13. Jumlah pegawai meninggal laki-laki golongan ruang IV/e 6 orang, paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sebanyak 3 orang, Sedangkan jumlah pegawai pindah wilayah perempuan golongan ruang IV/e hanya terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal 1 orang

H. Pegawai Berhenti Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Untuk grafik Pegawai Berhenti berdasarkan golongan dan jenis kelamin di lingkungan Kementerian Dalam Negeri keadaan bulan Oktober 2024 dapat terlihat sebagai berikut

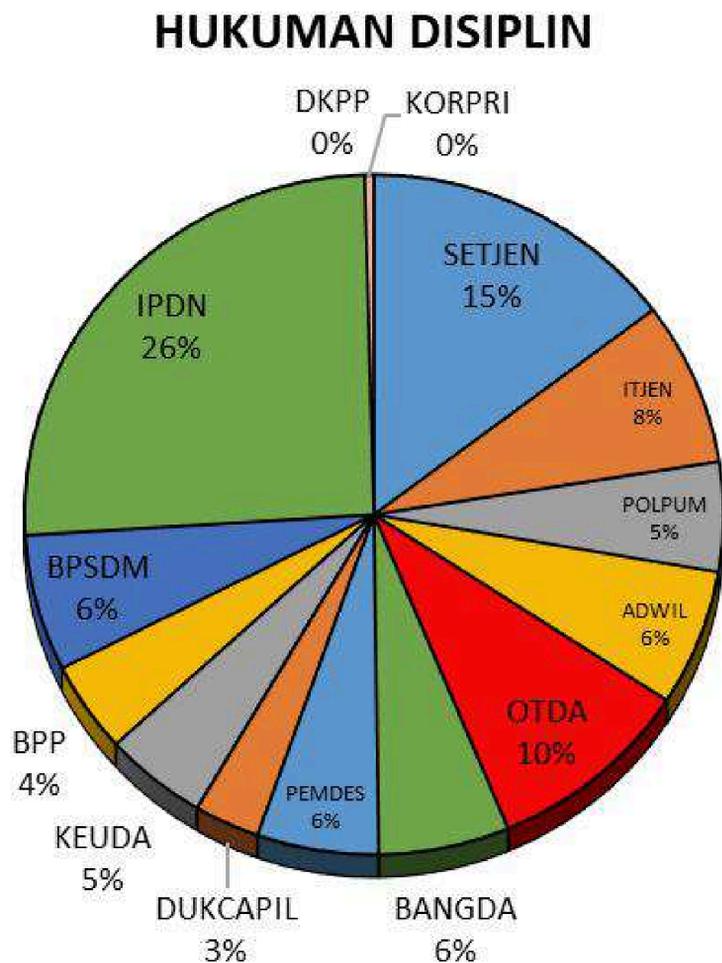




Berdasarkan Grafik Pegawai Berhenti Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Jumlah Pegawai Berhenti Golongan II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai berhenti laki-laki golongan ruang I/d terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 1 orang.
2. Jumlah pegawai berhenti laki-laki golongan ruang II/a terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 2 orang dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 1 orang.
3. Jumlah pegawai berhenti laki-laki golongan ruang II/b hanya terdapat pada unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sejumlah 1 orang.
4. Jumlah pegawai berhenti laki-laki golongan ruang II/c tersebar rata pada unit kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sekretariat Pengurus Korpri dengan jumlah masing-masing 1 orang. Sedangkan jumlah pegawai berhenti perempuan golongan ruang II/c hanya terdapat pada unit kerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sejumlah 1 orang.
5. Jumlah pegawai berhenti laki-laki golongan ruang II/d hanya terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 1 orang. Sedangkan jumlah pegawai berhenti perempuan golongan ruang II/c hanya terdapat pada unit kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sejumlah 2 orang.
6. Jumlah pegawai berhenti laki-laki golongan ruang III/a paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 7 orang. Sedangkan jumlah pegawai berhenti perempuan golongan ruang III/a paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 3 orang.
7. Jumlah Pegawai berhenti laki-laki golongan ruang III/b paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 5 orang. Sedangkan jumlah pegawai berhenti perempuan paling banyak terdapat pada unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sejumlah 2 orang.
8. Jumlah Pegawai berhenti laki-laki golongan ruang III/b paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 5 orang. Sedangkan jumlah pegawai berhenti perempuan paling banyak terdapat pada unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sejumlah 2 orang.
9. Jumlah Pegawai berhenti laki-laki golongan ruang III/c paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 2 orang. Sedangkan jumlah pegawai berhenti perempuan paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 3 orang.
10. Jumlah Pegawai berhenti laki-laki golongan ruang III/d paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah masing-masing sejumlah 2 orang. Sedangkan jumlah pegawai berhenti perempuan paling banyak terdapat pada unit kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sejumlah 2 orang.
11. Jumlah pegawai berhenti laki-laki golongan ruang IV/a hanya terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 1 orang.
12. Jumlah Pegawai berhenti laki-laki golongan ruang IV/b paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 2 orang. Sedangkan jumlah pegawai berhenti perempuan paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal sejumlah 3 orang.
13. Jumlah Pegawai berhenti laki-laki golongan ruang IV/d paling banyak terdapat pada unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejumlah 2 orang.

VII. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukuman Disiplin



NO.	UNIT KERJA	JUMLAH SELURUH
1	2	3
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0
	BIRO PERENCANAAN	3
	BIRO KEPEGAWAIAN	3
	BIRO UMUM	8
	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	3
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	2
	BIRO HUKUM	2
	PUSAT FASILITASI KERJA SAMA	2
	PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI	4
	BIDANG HUKUM DAN KESATUAN BANGSA	0
	BIDANG PEMERINTAHAN	0
	BIDANG KEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	0
	BIDANG APARATUR DAN PELAYANAN PUBLIK	0
	BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	0
	STAF KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI	0
	PUSAT PENERANGAN	0
	BIRO KEUANGAN DAN ASET	7
2	INSPEKTORAT JENDERAL	18
3	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	12
4	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	15
5	DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH	22
6	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH	14
7	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	13
8	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7
9	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	11
10	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI	10
11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15
12	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	59
13	SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	0
14	SEKRETARIAT PENGURUS KORPRI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	1
	TOTAL	231

Berdasarkan Grafik di atas, jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terkena hukuman disiplin paling banyak terdapat pada unit kerja Sekretariat Jenderal dengan jumlah 34 orang. Sementara itu, unit kerja Inspektorat Jenderal memiliki 18 orang Pegawai Negeri Sipil yang terkena hukuman disiplin. Selanjutnya, unit kerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tercatat dengan 12 orang Pegawai Negeri Sipil yang menerima hukuman disiplin. Unit kerja Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah juga mencatatkan 15 orang Pegawai Negeri Sipil yang terkena hukuman disiplin, sementara unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah memiliki 22 orang yang terlibat dalam hal ini.

Diikuti dengan unit kerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang mencatatkan 14 orang Pegawai Negeri Sipil yang terkena hukuman disiplin, serta unit kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang memiliki 13 orang Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan hukuman disiplin. Unit kerja Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercatat dengan jumlah 7 orang Pegawai Negeri Sipil yang menerima hukuman disiplin, sedangkan unit kerja Direktorat Jenderal Keuangan Daerah memiliki 11 orang Pegawai Negeri Sipil yang terkena hukuman disiplin.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri masing-masing mencatatkan 15 orang dan 59 orang Pegawai Negeri Sipil yang terkena hukuman disiplin. Di sisi lain, unit kerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak memiliki Pegawai Negeri Sipil yang terkena hukuman disiplin, yang tercermin dengan angka 0. Unit KORPRI tercatat dengan 1 orang Pegawai Negeri Sipil yang terkena hukuman disiplin. Secara keseluruhan, jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terkena hukuman disiplin mencapai total 231 orang.



Kesimpulan

Berdasarkan data yang disajikan, kondisi pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, data mengenai pegawai yang pindah wilayah kerja menunjukkan adanya distribusi yang tidak merata antara golongan dan jenis kelamin, dengan dominasi pegawai laki-laki pada golongan III dan IV, khususnya di unit kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Meskipun demikian, pergerakan pegawai di tingkat golongan II dan III lebih terlihat pada unit kerja seperti Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Kedua, jumlah pegawai yang berhenti juga menunjukkan kecenderungan yang signifikan pada golongan III, terutama di unit kerja Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pengunduran diri pegawai pada golongan-golongan tertentu. Selanjutnya, data mengenai pegawai yang meninggal mencatatkan angka yang relatif kecil dan tersebar di berbagai unit kerja, dengan angka tertinggi pada golongan IV/d dan IV/e. Meskipun angka ini tidak terlalu besar, penting untuk mencatatnya dalam konteks evaluasi kesejahteraan pegawai. Terakhir, mengenai hukuman disiplin, terdapat 231 pegawai yang tercatat menerima sanksi, dengan Sekretariat Jenderal menjadi unit kerja dengan jumlah pegawai terbanyak yang terlibat dalam pelanggaran disiplin. Hal ini menunjukkan bahwa ada area yang memerlukan perhatian lebih dalam hal pengawasan dan pengelolaan pegawai, untuk memastikan bahwa budaya kerja yang produktif dan disiplin dapat tercapai.

© **Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri**